

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP BELANJA MODAL SERTA DAMPAKNYA
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH PADA
KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU JAWA**

SKRIPSI



oleh :

Nama : Siti Nestiti . L

Nomor Mahasiswa : 10 312 251

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2014

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP BELANJA MODAL SERTA DAMPAKNYA TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH PADA KABUPATEN DAN KOTA DI
PULAU JAWA**

Skripsi S1

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna
memperoleh gelar sarjana strata-1 di Jurusan Akuntansi,
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

ditulis oleh :

Nama : Siti Nestiti .L

Nomor Mahasiswa : (10312251)

Jurusan : Akuntansi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2014

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 14 M A R E T. 2014

Penyusun,



(Siti Nestiti .L)

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP BELANJA MODAL SERTA DAMPAKNYA TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH PADA KABUPATEN DAN KOTA
PROVINSI WILAYAH PULAU JAWA**



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal

14 M A R E T 2014

Dosen Pembimbing,



Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Kabupaten dan Kota Provinsi Wilayah Pulau Jawa

Disusun Oleh : **Siti Nestiti Listyoningrum**
Nomor Mahasiswa : **10312251**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 23 April 2014

Penguji/ Pembimbing Skripsi: Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si.

Penguji : Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., SAS



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

MOTTO

“Hai manusia, sembahlah Tuhan-mu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa”

(QS. Al-Baqoroh : 21)

“Allah akan meninggikan orang – orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang di beri ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(QS. Al-Mujaadilah :11)

Jika kamu bersyukur atas karunia-Ku, pasti akan Aku tambah untukmu, dan jika kamu berlaku ingkar, sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”

(Q.S. Ibraahimm : 7)

“ Mintalah pertolongan dengan sabar dan mengerjakan shalat sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”

(Q.S. Al-Baqarah:153)

“ Pada setiap kesusahan pasti ada jalan keluar. Kehidupan harus dijalani dengan semangat, terus berusaha, senantiasa berdo’a, selalu bersyukur, dan yakin pasti bisa.”

“Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan di situ, maka Allah akan mempermudah baginya suatu jalan untuk menuju ke surga.”

Rosulullah bersabda: “jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka semua (pahala) amalnya terputus, kecuali (pahala) sadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak shalih yang slalu memanjatkan doa untuknya”

(Hadist Riwayat Muslim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tak terlukis syukur aku panjatkan KepadaMu Ya Allah
atas segala nikmat tak terputus yang telah Engkau berikan
kepada hambaMu ini.*

Dengan segala kerendahan hati, aku persembahkan karya kecilku ini untuk:

☞ **Orang Tuaku tercinta "Bapak B. Marminto & Ibu N. Salmah"**

" Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk baktiku pada mama dan papa. Terimakasih atas segala Doa dan support nya dalam menyelesaikan skripsi ini. Sampai kapan pun Mbak akan terus berusaha membahagiakan papa mama dan akan terus berusaha menjadi anak yang terbaik dan berusaha menjadi panutan yang baik untuk adik-adik ".

☞ **Adik-adikku tersayang "N. Tyas dan R. Paras"**

" Terimakasih atas supportnya. Mbak berharap adik-adik sekalian dapat mencapai segala cita-cita yang diimpikan dan selalu menjadi anak yang sholeh, amin..."

☞ **Someone special "Al. H. Bissidqi, SE."**

" Terimakasih Mas Bissidqi atas segala perhatian dan kesetiaanmu selama ini. Thankyou for support. Alhamdulillah ".

☞ **Sahabat sekaligus saudara kembarku yang selalu menemaniku dalam proses penyusunan skripsi "Siti Indah Dhiavany".**

☞ **Seseorang yang banyak memberikanku inspirasi, motivasi, support dan dengan ketulusan mendoakan, ketika aku mulai down dalam mengerjakan skripsi ini, you are the best in my life and a miracle with you **Kharisma Muhammad**. Terima kasih untuk semua pelajaran hidup yang diberikan.**

☞ **Sudaraku sekaligus sahabatku dari lahir sampai saat ini **Hutomo Putro**. Terima kasih ya mas atas dukungan dan nasehat yang diberikan untukku. Kebersamaan kita selalu berkesan dan menyenangkan.**

☞ **Segenap keluarga Besar Bp. Ali Sumardjo dan keluarga besar Bp. Ibrahim Muchtar di Riau dan Medan, Sumatera Utara.**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala Puji dan syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam karena berkat Rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah saw, karena berkat perjuangan beliau kini ummatnya dapat menikmati alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi prasyarat akademis untuk mencapai gelar kesarjanaan Strata-1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mendapatkan bantuan, dorongan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua yang telah mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

- **Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.,** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
- **Bapak Prof. Hadri Kusuma, MBA., DBA.,** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- **Ibu Fitriati Akmila, SE., M.Com.,** selaku Dosen Pembimbing Akademik.
- **Ibu Dra. Isti Rahayu, M.Si., Ak.,** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- **Bapak Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si.,** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar membimbing penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih pak atas segala nasehat, bimbingan dan setiap pertemuan yang berkesan.

- **Orang Tua tercinta**, Terima kasih atas doa, kasih sayang, dorongan, kepercayaan, nasehat, dan bantuan baik material maupun spiritual yang telah diberikan selama ini kepadaku. Semoga skripsi ini dapat menjadi tanda terima kasih dan baktiku atas segala apa yang telah kalian berikan demi kebaikan dan keberhasilanku serta dapat selalu membahagiakan papa dan mama.
- **Adik-adikku tersayang: N. Tyas dan R. Paras**. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Semoga menjadi skripsi ini dapat menjadi motivasi adik-adikku semua agar mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi dan semoga adik-adikku menjadi anak yang cerdas dan sholehah.
- Seseorang yang berarti dalam hidupku yang selalu baik dan sabar menemaniku **Al.H.Bissidqi, SE**. Terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, doa dan kesetiaannya selama ini.
- Sahabatku sekaligus saudara kembarku waktu SD, SMP dan SMA **Siti Indah Dhiavany**. Terima kasih ya nduk buat waktunya menemaniku, bersamamu menjadi sangat menyenangkan.
- Seseorang yang banyak memberikanku inspirasi, motivasi, support dan dengan ketulusan mendoakan, ketika aku mulai down dalam mengerjakan skripsi ini, you are the best in my life and a miracle with you **Kharisma Muhammad**. Terima kasih untuk semua pelajaran hidup yang diberikan.
- Sudaraku sekaligus sahabatku dari lahir sampai saat ini **Hutomo Putro**. Terima kasih ya mas atas dukungan dan nasehat yang diberikan untukku. Kebersamaan kita selalu berkesan dan menyenangkan.
- **Sahabat-sahabatku** : Kiki Padmasari, Andita Belina, Aditya Febrianza, Wildan.F.W, M.Pahri Nanda, Arina Pramudhita, Eka Trina, Indah Hijrielda, Widya Pratiwi, Sariyeni, Febri Kurniawan, Dwi Shanidra. Terima kasih atas segala waktu, support serta motivasinya, untuk arti persahabatan, perjuangan belajar, berkeluh kesah bersama selama ini. Kebersamaan dengan kalian semua sangat berkesan dan tidak terlupakan.
- Teman-teman seperjuangan **FE UII jurusan Akuntansi Angkatan 2010**, semuanya yang tidak bisa disebutin satu-satu terima kasih atas dukungan dan doanya.
- Teman-teman seperjuangan **KKN Angkatan 47 semester antar waktu, Unit KL – 68**, seperti: Alam Kurniawan, Fendy Estu Mardika, Fahrozi, Muhammad Solihin, Nana Mokoginta, Mitta Arum Almira, Riska Aminatun Zahroh, terima kasih untuk

kerja samanya di KKN dulu, tetep kompak semoga bisa tetep menjalin tali silaturahmi. Indahya masa-masa KKN dulu.

- **Segenap dosen FE UII** yang telah memberikan banyak sekali ilmu, pengalaman dan nasehat kepada penulis.
- **Teman-Temanku** yang tidak terlupakan ketika berada di **SDN 001 Sail-Cintaraja**, di **SMPN 4 Pekanbaru**, di **SMAN 8 Pekanbaru**, di **Fakultas Ekonomi UII**, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas dukungan teman-teman semua.
- Terakhir untuk segenap pihak yang telah membantu penulis, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan semangat dan dorongan hingga akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan baik dan sesuai harapan. *Jazakumullah khoir*. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Akhir kata, dengan keterbatasan pengetahuan penulis, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, serta menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Maret 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan Skripsi	i
Halaman Judul Skripsi	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iv
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xv
Daftar Tabel	xvi
Daftar Lampiran.....	xvii
Abstraksi	xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal.....	12
a. Konsep Desentralisasi Fiskal	12
b. Landasan Hukum Desentralisasi Fiskal	19
2.2 Implementasi Desentralisasi Fiskal Di Indonesia	23

a. Sejarah Desentralisasi Fiskal Di Indonesia	23
b. Implementasi Undang-Undang No. 22 dan No. 25 Tahun 1999	30
c. Sumber-sumber Penerimaan Daerah.....	34
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34
2. Dana Perimbangan	36
3. Dana Alokasi Khusus (DAK).....	39
4. Pinjaman Daerah	40
d. Ukuran Keberhasilan Desentralisasi Fiskal	41
2.3 Anggaran Daerah	45
2.4 Penggolongan Loyalitas Merek	48
2.5 Pertumbuhan Ekonomi.....	49
2.6 Produk Domestik Bruto	49
2.7 Penelitian Terdahulu	50
2.8 Pengembangan Hipotesis	53
a. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal	53
b. Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal	53
c. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi	54
d. Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	56
e. Pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi	58
2.9 Kerangka Penelitian	58

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel.....	60
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	60
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	61
3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	61

3.4.1. Pertumbuhan Ekonomi	61
3.4.2. Belanja Modal.....	62
3.4.3. Pendapatan Asli Daerah.....	62
3.4.4. Dana Alokasi Umum	62
3.5. Metode Analisis	63
a. Analisis Deskriptif	63
b. Analisis Induktif	63

BAB IV ANALISIS DATA

4.1. Deskripsi data Penelitian.....	66
4.2. Analisis Data.....	67
4.2.1 Analisis <i>Structural Equation Models</i> (SEM).....	67
4.2.2 Persamaan Struktural dan Measurement Model	67
4.2.3 Evaluasi Kriteria <i>Goodness of Fit</i>	70
a. Evaluasi Normalitas Data	70
b. Evaluasi Outlier	71
c. Evaluasi <i>Multicollinearity</i> dan <i>Singularity</i>	72
d. Evaluasi Indeks Kriteria <i>Goodness of Fit</i>	73
e. Evaluasi <i>Regression Weight</i> untuk Uji Kausalitas	73
f. Analisis <i>Direct Effect</i> , <i>Indirect Effect</i> , dan <i>Total Effect</i>	74
4.3 Pengaruh Tidak Langsung PAD dan DAU thd PDRB Melalui BM.....	76
4.4. Pengujian Hipotesis	77
a. Hipotesis 1.....	77
b. Hipotesis 2	78
c. Hipotesis 3.....	79
d. Hipotesis 4	79

e. Hipotesis 5.....	80
4.5. Pembahasan.....	80
a. Hipotesis I dan IV	80
b. Hipotesis II dan V	81
c. Hipotesis III.....	83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	85
5.2 Keterbatasan.....	86
5.3 Saran	87

Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA	89
----------------------	----

Lampiran

LAMPIRAN.....	93
---------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Berpikir Penelitian.....	59
4.1. Hasil Rangkaian Alur SEM	68
4.2. Hasil Analisis SEM.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1. Kriteria Penerimaan Suatu Model.....	65
4.1. Nama Kabupaten/Kota Sampel.....	66
4.2. <i>Assessment of Normality</i>	70
4.3. Nilai Z-Score.....	71
4.4. Nilai Mahalanobis Distance	72
4.5. Hasil Perhitungan <i>Goodness of Fit</i>	73
4.6. Estimasi Parameter.....	74
4.7. <i>Standardized Direct Effects – Estimates</i>	75
4.8. <i>Standardized Indirect Effects – Estimates</i>	75
4.9. <i>Standardized Total Effects – Estimates</i>	76
4.10. Hasil Uji Hipotesis.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

I Rekapitulasi Data Penelitian.....	93
II Rekapitulasi Hasil Data Penelitian.....	98
III Hasil Pengujian SEM Dengan Menggunakan Amos 7.0	103

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Wilayah Pulau Jawa terdiri dari 6 provinsi, 85 Kabupaten dan 34 Kota, dan yang memenuhi kriteria sebagai sampel adalah 26 kabupaten/kota, sehingga jumlah amatan yang dianalisis menjadi 130. Data yang digunakan adalah data PDRB atas dasar harga konstan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dan realisasi PAD, DAU serta belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Wilayah Pulau Jawa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Data tersebut bersumber dari DJKD Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Yogyakarta. Pengujian dilakukan dengan analisis structural equation models (SEM). Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Sementara belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi*

ABSTRACT

This study aims to test and prove empirically the effect of revenue (PAD) and the General Allocation Fund (DAU) for capital expenditures and their impact on regional economic growth. The population of this research is the local government district and city in the province of Java Island as many as 6 province with 85 districts and 34 cities, and which meet the criteria in the sample were 26 districts / cities, so the number of observations were analyzed to 130. The data used is data GDP at constant prices to see economic growth and the realization of PAD, DAU and capital expenditures in the districts / cities in province of Java Island from 2008 to 2012. The data is sourced from DJKD Ministry of Finance and the Central Bureau of Statistics province. Testing is done with structural equation models (SEM). The analysis showed that PAD is a significant positive impact on capital spending and economic growth, DAU is a significant positive impact on capital spending and economic growth. While capital expenditures are positive but no significantly impact on economic growth.

Keywords: *Revenue, General Allocation Fund, Capital Expenditures, Economic Growth*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2002). Pengamat ekonomi, pengamat politik, investor, hingga rakyat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Halim, 2009).

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun untuk kabupaten dan kota. Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja.

Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan agency theory yang mana pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting.

Lingkup anggaran akan menjadi relevan dan penting dalam lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran sektor publik pemerintah daerah merupakan output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Key dalam Fozzard, 2001).

Keterbatasan sumber daya pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam

public expenditure management (Fozzard, 2001). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas *fiscal* rendah (Halim, 2001).

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan kepada publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Pemanfaatan belanja hendaknya di alokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan (Saragih, 2003). Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan

sumber-sumber pendapatan di luar PAD, karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah, sedangkan bentuk pemberian pemerintah yang non PAD lebih bersifat terikat. Keterbatasan infrastruktur seperti sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan masalah dalam alokasi PAD yang sebenarnya.

Abdullah dan Halim (2003) menemukan adanya perbedaan referensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian spread PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk belanja modal justru mengalami penurunan. Abdullah menduga bahwa *the power of legislative* yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan spread PAD tidak sesuai dengan preferensi publik. Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah.

Abdullah dan Halim (2003) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah, 2004).

Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai

kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi terjadi hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relative mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi. Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana Pemerintah.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU ditujukan untuk kabupaten dan kota di Indonesia, namun tidak semua kabupaten dan kota mendapatkan dana dari DAU seperti wilayah provinsi DKI Jakarta. Karena otonomi provinsi DKI Jakarta diletakkan pada lingkup provinsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah DAU secara keseluruhan ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Pemerintah merumuskan formula dan penghitungan DAU dengan memperhatikan pertimbangan dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah. Konsekuensi atas penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengakibatkan perlunya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat

dan pemerintah daerah yang menyebabkan terjadinya transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana tersebut untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang mungkin tidak penting.

Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi Umum. Bagi pusat, Dana Alokasi Umum dijadikan instrument *horizontal imbalance* untuk pemerataan atau mengisi *fiscal gap*. Bagi daerah, Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhannya. Di sisi lain, alokasi Dana Alokasi Umum berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena dasar perhitungan *fiscal needs* tidak memadai (terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing-masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis belanja). Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Kawedar, dkk (2008) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan

Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Menurut Halim (2009) belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Peneliti sebelumnya seperti Mutiara Maemunah (2006) yang meneliti di Sumatra, Bambang Kesit Prakosa (2004) yang meneliti di DIY dan Jawa Tengah, Syukriy & Halim (2003) yang meneliti di Jawa dan Bali memperoleh hasil yaitu PAD dan DAU signifikan berpengaruh terhadap belanja daerah. Penelitian lain dilakukan oleh Darwanto & Yulia Yustikasari (2007) menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan

terhadap belanja modal. Dalam penelitian tersebut didapatkan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal dan hubungannya positif. Sedangkan DAU berpengaruh dan hubungannya negatif. Penelitian yang dilakukan Nugroho (2010) menunjukkan bahwa untuk hasil uji secara parsial PAD tidak berpengaruh terhadap prediksi belanja modal sedangkan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap prediksi belanja modal. Beberapa penelitian yang dilakukan seringkali memperoleh hasil yang berbeda-beda dan cenderung tidak konsisten satu sama lain. Atas dasar tidak konsistennya hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih mendalam khususnya di pulau Jawa.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Sheila Ardhian Nuarisa (2013) yaitu mengenai Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan mengambil periode penelitian 2011 sedangkan peneliti sekarang meneliti Pengaruh PAD dan DAU terhadap alokasi belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, menggunakan periode penelitian tahun 2008-2012 dengan sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Wilayah Pulau Jawa, yang relatif lebih luas daripada peneliti terdahulunya, dan mengurangi variabel DAK, serta menambahkan variabel pertumbuhan ekonomi pada variabel dependen.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Wilayah Pulau Jawa**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dibentuk rumusan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah terdapat pengaruh PAD terhadap Belanja Modal?
- b. Apakah terdapat pengaruh DAU terhadap Belanja Modal?
- c. Apakah terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
- d. Apakah terdapat pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
- e. Apakah terdapat pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap Belanja Modal
- b. Untuk mengetahui pengaruh DAU terhadap Belanja Modal
- c. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

- d. Untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- e. Untuk mengetahui pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk memperoleh bukti pengaruh PAD terhadap Belanja Modal.
- b. Untuk memperoleh bukti pengaruh DAU terhadap Belanja Modal.
- c. Untuk memperoleh bukti pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- d. Untuk memperoleh bukti pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- e. Untuk memperoleh bukti pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bagian sebagai berikut :

BAB I: Menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan teori untuk menganalisis dalam penelitian serta menjelaskan penelitian terdahulu yang terkait, menarik hipotesis dan menggambarkan kerangka teori.

BAB III: Menjelaskan metode penelitian yang dipakai dan sampel data yang lebih terperinci.

BAB IV: Menganalisis dan membahas hasil-hasil olahan data penelitian.

BAB V: Ditutup dengan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Lahirnya kebijakan otonomi daerah yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian disusul dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang berlandaskan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tidak terlepas dari tuntutan reformasi yang bergulir mulai beberapa tahun sebelumnya. Salah satu isu utama yang menjadi agenda reformasi adalah adanya perubahan sistem pemerintahan daerah dari sentralistik menuju ke desentralistik. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sistem pemerintahan Indonesia di era orde baru lebih bernuansa sentralistik, walaupun secara formal dinyatakan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya adalah prinsip desentralisasi.

a. Konsep Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi menurut jenisnya dapat dibedakan dalam beberapa konsep, yaitu (Campo dan Sundaram; Sidik; Martinez Vazquez dan McNab, dalam Nugroho, 2010) :

- 1) Desentralisasi geografis atau desentralisasi teritorial, yakni pembagian suatu wilayah menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil dengan kewenangan yurisdiksi yang jelas diantara daerah-daerah tersebut;

- 2) Desentralisasi fungsional yakni pendistribusian kewenangan dan tanggungjawab negara kepada unit-unit fungsional yang berbeda-beda dalam suatu pemerintahan;
- 3) Desentralisasi politik dan administrasi. Desentralisasi politik berkenaan dengan kewenangan pembuatan keputusan yang bergeser dari pemerintah yang lebih tinggi ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Dalam konteks ini partisipasi masyarakat lokal dalam proses pembuatan keputusan mendapat peluang yang sangat luas. Sedangkan desentralisasi administratif erat kaitannya dengan desentralisasi politik, bahkan secara faktual keduanya sulit dibedakan. Namun lebih difokuskan pada operasionalisasi atau implementasi kebijakan/ keputusan publik agar berhasil secara optimal.
- 4) Desentralisasi finansial, yakni berkaitan dengan pelimpahan tanggung jawab pembelanjaan dan pendapatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Bentuk-bentuk desentralisasi finansial ini antara lain adalah *self-financing* beberapa penyelenggaraan pembangunan di daerah, *cofinancing* atau *coproduction* dengan pihak-pihak swasta, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak daerah dan retribusi, pinjaman daerah, serta transfer atau subsidi antar tingkatan pemerintahan.

Behrman, *et al*, dalam Nugroho (2010) dan Sidik (2002), menyatakan bahwa dorongan desentralisasi yang terjadi di berbagai negara dunia terutama negara-negara berkembang, dipengaruhi oleh beberapa

faktor misalnya latar belakang atau pengalaman suatu negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan masyarakat, tanda-tanda adanya disintegrasi, dan banyaknya kegagalan yang dialami oleh pemerintah sentralistis dalam memberikan pelayanan masyarakat yang efektif.

Kegagalan penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang kemudian memunculkan pemikiran perlunya pengaturan desentralisasi termasuk desentralisasi fiskal adalah berkaitan dengan siklus pengelolaan dana yang berasal dari pusat kepada daerah berupa subsidi dan bantuan (Inpres). Permasalahan yang muncul dari pengelolaan yang terpusat meliputi: (1) aspek perencanaan, dominannya peranan pusat dalam menetapkan prioritas pembangunan (*top down*) di daerah dan kurang melibatkan *stakeholder*, (2) aspek pelaksanaan, harus tunduk kepada berbagai arahan berupa petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis dari pusat, dan (3) aspek pengawasan, banyaknya institusi pengawasan fungsional, seperti BPKP, Irjen Departemen, Irjenbang, Inspektorat Daerah yang dapat saling tumpang tindih (Boediono, 2002; Sidik, 2002; dan, Widjaja, 2002).

Menurut Bahl dan McMullen (dalam Noni Puspita Sari dan Idhar Yahya, 2009) dan Widjaja (2002) yang terpenting dari desentralisasi adalah makin dekatnya hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Jika keinginan rakyat sangat beragam dan Pemerintah Daerah memiliki

tanggungjawab untuk menyediakan pelayanan-pelayanan yang tidak memiliki dampak eksternal yang besar, maka manfaat yang dapat diperoleh berupa pelayanan publik yang lebih baik, pejabat pemerintah yang bertanggungjawab dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akan meningkat.

Berkaitan dengan desentralisasi finansial atau disebut juga sebagai desentralisasi di bidang ekonomi yakni adanya penyerahan sebagian kewenangan Pemerintah kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi, bertujuan untuk mengatur dan mengurus perekonomian daerah dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian secara nasional (Suyono, 2003). Ketiga fungsi tersebut menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat. Namun untuk menuju kepada sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, sebagian besar wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat tersebut didesentralisasikan kepada pemerintah daerah, dimana tetap ada sebagian wewenang dan tanggungjawab yang masih dikendalikan pemerintah pusat, contohnya seperti kebijakan yang mengatur variabel ekonomi makro.

Melalui desentralisasi fiskal seperti ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembangunan dan penyediaan pelayanan umum karena semakin dekatnya masyarakat dengan pemerintah sehingga mampu mengakomodasi kondisi masyarakat dan wilayah yang heterogen. Disamping itu melalui kebijakan desentralisasi ini juga diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan

bertanggung jawab (*good government*), meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintahan (Bird; Bahl dan McMullen, dalam Noni Puspita Sari dan Idhar Yahya (2009)). Dengan demikian desentralisasi merupakan alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis.

Komponen kunci dan utama dalam kebijakan desentralisasi adalah desentralisasi fiskal, karena dengan desentralisasi fiskal wewenang pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih besar. Pengertian desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk menggali dan menggunakan sendiri sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensinya masing-masing (Bird dan Vaillancourt, dalam Noni Puspita Sari dan Idhar Yahya, 2009).

Khusus berkaitan dengan desentralisasi fiskal, banyak pakar menekankan perlunya desentralisasi fiskal untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan akuntabilitas, dan peningkatan mobilisasi dana (Bird & Vaillancourt, dalam Noni Puspita Sari dan Idhar Yahya, 2009). Adapun kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, menurut Kadjatmiko (2002), dilakukan dengan tujuan yaitu: (1) Menjaga kesinambungan kebijaksanaan fiskal dalam konteks kebijaksanaan ekonomi makro; (2) Mengoreksi *vertical imbalance*, yaitu memperkecil ketimpangan yang terjadi antara keuangan pemerintah pusat dan keuangan

daerah yang dilakukan dengan memperbesar *taxing power* daerah; (3) Mengoreksi *horizontal imbalance* yaitu ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangannya; (4) Meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah; (5) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan (6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik.

Sedangkan desentralisasi administratif adalah pelimpahan wewenang, tanggungjawab dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik, meliputi perencanaan, pendanaan dan pelimpahan manajemen. Desentralisasi administratif meliputi: (1) Dekonsentrasi (*deconcentration*), yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pejabat yang berada dalam garis hirarki dengan pemerintah pusat di daerah, oleh Silverman (dalam Noni Puspita Sari dan Idhar Yahya, 2009) juga disebut sebagai *Branch Office Model*; (2) Devolusi (*devolution*), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan, dalam istilah Silverman (dalam Noni Puspita Sari dan Idhar Yahya, 2009) juga disebut sebagai *Discretionary Authority Model*; dan (3) Delegasi (*delegation or institutional pluralism*) yaitu pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat, oleh Silverman (dalam Noni Puspita Sari dan Idhar

Yahya, 2009) dikenal sebagai *Independent Subsidiary Model*. Menurut Pramusinto (2001), penerapan prinsip-prinsip desentralisasi di atas akan melahirkan fungsi dan peran pemerintah daerah yang berbeda. Dalam hal ini ada dua pandangan untuk menggambarkan peran yang dimainkan oleh pemerintah daerah, yaitu: *autonomous model* dan *integrated model*. *Autonomous model* menggambarkan bahwa pemerintah daerah secara relatif terpisah dari pemerintah pusat, sedangkan *integrated model* memandang hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai bagian yang saling terintegrasi. Pola hubungan yang terjadi antara berbagai tingkatan pemerintahan bersifat pragmatis dan fleksibel tergantung kepada kebutuhan persoalan-persoalan yang dihadapi.

Meskipun dari sudut pandang manajemen, efektivitas dan efisiensi, desentralisasi dinilai akan menciptakan sistem pemerintahan, dan berpeluang meningkatkan pemerataan pembangunan dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang sentralistik, namun tidak ada yang menjamin bahwa desentralisasi akan bisa berjalan dengan baik, yang disebabkan: (1) pengendalian makro ekonomi, seperti instrumen-instrumen fiskal utama: pajak, pengeluaran pemerintah dan pinjaman yang seharusnya dikendalikan oleh pusat, (2) terkait dengan arah investasi dalam prasarana sosial. Jika kewenangan fiskal sepenuhnya diserahkan kepada daerah, investasi akan cenderung diprioritaskan pada proyek-proyek yang memiliki manfaat dalam skala lokal saja, sehingga investasi yang sifatnya lebih luas (listas daerah) masih memerlukan dana tambahan dari

pemerintah pusat (Bahl dan McMullen, dalam Noni Puspita Sari dan Idhar Yahya, 2009).

Pemberian wewenang kepada daerah yang lebih luas dalam pemungutan pajak dan retribusi dapat berakibat pada penurunan investasi dan usaha secara makro maupun regional karena ini berpotensi melahirkan ekonomi biaya tinggi. Pada sisi lain desentralisasi juga memunculkan potensi terjadi konflik kepentingan antara daerah dan nasional. Penyerahan pengelolaan terhadap daerah dapat menyebabkan beberapa tujuan pembangunan ekonomi secara nasional tidak tercapai.

Sejalan dengan hal ini, menurut Nurkholis (2001), terdapat isu utama yang mengemuka dan harus segera direspon oleh pemerintah daerah, yaitu:

- 1) paradigma baru yang menempatkan rakyat sebagai mitra yang berkedudukan sejajar dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk merencanakan strategi pembangunan daerahnya dengan lebih baik dan terarah, serta mengimplementasikannya secara transparan dan *accountable*;
- 2) perlu disadari bahwa otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya keteraturan sosial. Otonomi harus memberikan peluang yang sehat bagi persaingan antar daerah, yang tentu saja harus dibarengi dengan persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang belum mampu mensejajarkan diri dalam suatu *level of playing field*.

b. Landasan Hukum Desentralisasi Fiskal

Pelaksanaan pemerintahan dalam suatu negara merupakan implementasi dari amanat konstitusi yang mendasarinya. Kebijakan desentralisasi memiliki landasan hukum yang kuat dan dimuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam pasal ini dan penjelasannya disebutkan bahwa Negara Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administratif. Implementasi dari amanat UUD tersebut direalisasikan dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Jika dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 diatur bahwa yang disebut pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD sehingga kedudukan DPRD sebagai lembaga eksekutif, maka di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, secara tegas menetapkan bahwa di daerah dibentuk DPRD sebagai badan legislatif daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah selaku badan eksekutif daerah yang terdiri dari kepala daerah beserta perangkat daerah. Sedangkan pada Undang-Undang pemerintahan daerah yang terbaru yakni UU No.32 Tahun 2004, menyatakan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah (bukan lembaga legislatif daerah).

Seiring dengan perkembangan sosial ekonomi dan dari berbagai pengalaman pelaksanaan pembangunan selama hampir 30 tahun, dirasakan implementasi UU No. 5 Tahun 1974 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan wilayah, dengan puncaknya ketika terjadi krisis ekonomi yang diiringi dengan adanya tuntutan reformasi di segala bidang termasuk di dalamnya tuntutan desentralisasi/otonomi. Dalam rangka merespon aspirasi tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dalam Pasal 7 UU No. 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang meliputi: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, pemberdayagunaan sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Selanjutnya pada pasal 8 ayat 1 dinyatakan bahwa kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia sesuai

dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Sedangkan pada pasal 11 ayat 2, disebutkan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka desentralisasi fiskal berarti bahwa kepada daerah diberikan wewenang untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan demikian proporsi antara pemberian wewenang terhadap tugas, tanggungjawab dan pemberian wewenang dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung wewenang, tugas dan tanggungjawab tersebut hendaknya berimbang.

Setelah dikeluarkannya undang-undang yang menjadi landasan pelaksanaan desentralisasi fiskal, maka disusun perundangan di bawahnya yang berimplementasi di lapangan, yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Banyak lagi aturan hukum dan perundangan yang mendukung pelaksanaan desentralisasi yang bersifat sektoral, seperti perpajakan, pendidikan, bagi hasil SDA dan lain sebagainya.

Selanjutnya Undang-Undang No.22 dan 25 Tahun 1999 direvisi menjadi Undang-Undang No.32 dan 33 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang tersebut penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah (penjelasan atas UU.No.32 Tahun 2004).

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber-sumber keuangan antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, pada prinsipnya Pemerintah menganut prinsip : uang mengikuti fungsi.

2.2. Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia

a. Sejarah Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Perdebatan mengenai kebijakan desentralisasi serta kerangka peraturan yang dihasilkan seputar hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia bukanlah fenomena baru. Sesungguhnya, tahun 2005 ini merupakan peringatan ke 102 tahun dari upaya desentralisasi yang pertama di Indonesia, yaitu ketika Pemerintah Kolonial Belanda memberlakukan *Desentralisatiewet* 1903. Berikut rangkuman sejarah desentralisasi fiskal yang dikutip dari Buku Kompilasi Undang-undang Otonomi Daerah dan sekilas proses kelahirannya oleh Tim Peneliti ILD (2004) dan buku berjudul *Otonomi dan Pembangunan Daerah* yang ditulis Mudrajat Kuncoro (2004) bahwa prinsip sistem otonomi saat itu Daerah (*Gewest*) memiliki kewenangan pengaturan dan pemerintahan sendiri (*verijheid van regeling*) dengan mengacu pada peraturan Gubernur Jenderal, Kebijakan ini dimaksud sebagai cara untuk membuat Pemerintah Kolonial menjadi lebih efisien dalam mengatur penduduk serta mengeruk sumber daya alam. Prakarsa ini diambil sebagai respon terhadap berbagai tantangan berat yang dihadapi oleh penguasa kolonial saat itu. Namun demikian sistem kolonial tersebut terus mempertahankan kendali pusat yang kuat dengan sistem hirarki pemerintahan yang bersifat kaku. Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah ketika diberlakukan *Decentralistie Wet* 1903 tercermin pada Sumber-sumber Penerimaan Daerah ; 1) Tidak diatur secara formal. 2) Tidak

diperkenankan meminjam uang atas nama *Gewest* atau bagian *Gewest* kecuali berdasarkan keputusan yang disahkan dalam suatu ordonansi. Pengelolaan dan pertanggung jawaban *Gewest* diatur dengan peraturan umum dan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang tidak diatur dengan cara lain. Pengaturan keuangan sebanyak mungkin diserahkan kepada masing-masing *raad* (Dewan) dari *Gewest*.

Ketika Jepang menduduki Nusantara sejak 1942 sampai 1945, situasi perang menuntut sentralisasi kekuasaan. Kemudian setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri memahami benar betapa pentingnya hubungan antara Pusat dan Daerah. Pemerintah saat itu segera mengeluarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1945 tentang kewenangan Pusat dan Daerah yang memberikan keleluasaan lebih besar kepada daerah. Lebih lanjut Tim Peneliti ILD (2004) menjelaskan bahwa Undang-undang tersebut mengandung prinsip kemerdekaan pengaturan rumah tangga Daerah, asal tidak bertentangan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih luas. Hubungan keuangan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1945 dijelaskan bahwa sumber-sumber penerimaan; 1) Biaya untuk keperluan KND disediakan oleh Pemerintah Daerah, apabila kekurangan ditanggung oleh Pemerintah Pusat. 2) Daerah harus mempunyai harta benda. Hak pengelolaan tidak diatur secara formal.

Pada periode Perjuangan Kemerdekaan diterbitkan Undang-undang No. 22 Tahun 1948 yang mengandung hakekat otonomi luas. Terdapat

dua prinsip yang dikandung dalam Undang-undang tersebut yaitu a) Hak pengaturan dan pengurusan rumah tangga sendiri berdasarkan hak otonomi dan hak medebewind. b) Titik berat otonomi ada pada Desa dan Kota Kecil. Sumber-sumber penerimaan disebutkan terdiri dari 1) Pajak dan Retribusi Daerah. 2) Hasil Perusahaan Daerah. 3) Pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah dan 4) Lain-lain (Pinjaman dan Subsidi dari Pemerintah Pusat). Hak pengelolaan disebutkan 1) DPRD menetapkan peraturan cara mengurus keuangan daerah. 2) DPRD berwenang menetapkan APBD yang terlebih dahulu disahkan oleh Presiden untuk APBD Provinsi dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas untuk APBD daerah-daerah lain.

Periode Demokrasi Liberal pada tahun 1950-1959 diterbitkan dua Undang-undang yakni Undang-undang No. 32 Tahun 1956 dan Undang-undang No. 1 Tahun 1957 juga pada hakekatnya otonomi luas, mengandung prinsip otonomi formil : wewenang Daerah mengurus rumah tangganya tidak dibatasi/diperinci, sejauh tidak bertentangan dengan urusan yang diatur oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Sumber-sumber Penerimaan terdiri dari 1) Pajak dan Retribusi Daerah. 2) Pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah 3) Bagi hasil sebagian atau seluruhnya pajak negara dan 4) ganjaran, subsidi dan sumbangan. Hak pengelolaan dalam Undang-undang ini menyebutkan DPRD memegang semua kekuasaan pengelolaan umum keuangan Daerah lewat suatu Perda, seperti : 1) penyusunan

anggaran. 2) rencana anggaran. 3) menyelenggarakan keuangan daerah. 4) memeriksa perhitungan dan pertanggung jawaban keuangan Daerah. Rencana anggaran keuangan yang dibuat DPRD baru berlaku setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I dan oleh DPRD setingkat lebih atas bagi daerah lainnya.

Ketika konfigurasi politik otoritarian pada periode Demokrasi Terpimpin di tetapkan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 dan No. 5 Tahun 1960, prinsip yang dikandung Undang-undang ini adalah melanjutkan politik desentralisasi (teritorial) dan dekonsentrasi dimana Daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan memperhatikan kemampuan masing-masing Daerah.

Selanjutnya periode yang lebih dikenal dengan rezim Orde Lama ini menerapkan otonomi yang pada hakekatnya otonomi terbatas. Hubungan keuangan antar pemerintah Pusat dan Daerah tidak diatur secara formal dalam Undang-undang diatas.

Menjelang berakhirnya kekuasaan Orde Lama, Pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 18 Tahun 1965 yang mengadung prinsip; a) Otonomi teritorial yang riil dan seluas-luasnya, serta menjalankan politik dekonsentrasi sebagai komplemen yang vital. b) Otonomi selain sebagai hak/kewenangan dan sekaligus kewajiban. Sumber-sumber penerimaan Daerah terdiri dari; 1) hasil perusahaan daerah, 2) pajak dan retribusi daerah. 3) pajak negara yang diserahkan kepada daerah. 4) bagi hasil pajak Pemerintah Pusat 5)

pinjaman 6) lain-lain hasil utama. Mengenai hak pengelolaan keuangan daerah semua merupakan kekuasaan Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk pengesahan di jelaskan bahwa APBD harus mendapat pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi daerah lainnya. Pengesahan/penolakan tersebut dilakukan terhadap keseluruhan anggaran dan harus memuat alasan-alasannya.

Dibawah rezim Orde Baru dengan konfigurasi politik juga sama dengan orde lama yaitu otoritarian (Kuncoro, 2004) telah diterbitkan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 yang menurut Tim Peneliti ILD (2004) mengandung prinsip; a) Otonomi nyata dan bertanggung jawab, b) Otonomi adalah hak, wewenang dan sekaligus kewajiban. Sentralisasi telah meresap disemua aspek kehidupan, politik dan pemerintahan, demokrasi, perimbangan keuangan dan administrasi publik. Rezim Orde Baru menerapkan struktur hirarki kekuasaan yang bersifat kaku dimana Pemerintah Pusat memiliki kendali yang kuat disemua jenjang politik, pemerintahan dan hirarki sosial kemasyarakatan. Melalui jalur Birokrasi dan Militer, melakukan upaya mengendalikan hal tersebut. Pemerintah Pusat memonopoli pengelolaan kegiatan ekonomi dan penggalian sumber daya alam yang terdapat di Daerah. Struktur kekuasaan yang bersifat otoriter telah menimbulkan ketidakpuasan sosial yang mendalam dan meluas khususnya di kalangan masyarakat Daerah. Sumber-sumber penerimaan terdiri dari 1)

Pendapatan Asli Daerah yang dirinci (a) hasil pajak daerah (b) hasil retribusi daerah (c) hasil perusahaan daerah (d) lain-lain hasil yang sah. 2) Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah yang terdiri dari (a) sumbangan dari Pemerintah, (b) sumbangan sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan (c) lain-lain pendapatan yang sah. Mengenai pengelolaan adalah Kepala Daerah menyelenggarakan pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Selanjutnya pada zaman reformasi yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 sebagai anti klimak dari tuntutan rakyat yang di jalankan oleh para Mahasiswa, kerangka baru didalam hubungan antara pusat dan daerah. Ketetapan MPR No. XV Tahun 1998 dan Undang-undang No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 merupakan pilar penyangga bagi kerangka hubungan baru ini. Dalam kedua Undang-undang yang menjadi time set penelitian ini, mengandung tiga prinsip yaitu : a) Otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. b) Penyelenggaraan otonomi memperhatikan aspek demokratis, partisipatif, adil dan merata dengan memperhatikan potensi dan keragaman daerah. c) Otonomi provinsi bersifat terbatas, sekaligus menjalankan fungsi dekonsentrasi. Sumber-sumber penerimaan terdiri dari PAD (hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah) ; dana perimbangan ; pinjaman Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Hak Pengelolaan dan pertanggung jawaban

keuangan dalam pembiayaan pelaksanaan dekonsentrasi, tugas berbantuan dan desentralisasi dilakukan secara terpisah. Kepala Daerah adalah pengelolaan keuangan daerah (dana desentralisasi) dan dipertanggung jawabkan kepada DPRD. Sedangkan pengesahan APBD dalam bentuk Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

Setelah berjalan efektif selama tiga tahun kedua Undang-undang diatas, kemudian dirasakan berbagai kelemahan dan keperluan akan melakukan revisi. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya pada tahun 2004 dengan persetujuan DPR-RI diterbitkan Undang-undang No. 33 dan No. 34 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-undang sebelumnya, mengandung prinsip ; a) Otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. b) Penyelenggaraan otonomi yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, menjamin hubungan serasi antar daerah, dan menjamin hubungan serasi daerah dengan Pemerintah. Dalam Undang-undang yang terakhir ini dijelaskan bahwa sumber penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari ; a) Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan , dan lain-lain pendapatan. b) Pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Implementasi Undang-undang No. 22 dan No. 25 Tahun 1999

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-undang No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 efektif dimulai pada tahun anggaran 2001 (Januari 2001). Dari sisi keuangan negara pelaksanaan desentralisasi fiskal telah membawa konsekuensi pada perubahan pengelolaan fiskal yang mendasar. Total dana yang di transfer ke daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi fiskal pada tahun anggaran 2001 mencapai Rp 81,67 trilyun. Angka ini mencapai 5,7 persen dari PDB yang berarti terjadi peningkatan tajam dibandingkan dengan tahun 2000 yaitu Rp 33,5 trilyun atau sekitar 3,7 persen dari PDB. Peningkatan yang signifikan pada transfer dana ke daerah menyebabkan peranan pemerintah pusat dalam pengelolaan berkurang secara signifikan dan sebaliknya peranan daerah meningkat (Boediono, 2002). Sementara pada tahun 2002, jumlah dana yang didaerahkan meningkat menjadi Rp 94,5 trilyun atau sebesar 5,6 persen dari PDB (Sidik, 2002).

Kecenderungan peningkatan transfer dana ke daerah pada tahun 2003 dan 2004 terus terjadi, baik secara absolut maupun proporsi terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada tahun 2003 jumlah dana perimbangan mencapai Rp 116,9 trilyun (6 % PDB). Pada RAPBN Tahun 2004 jumlah ini direncanakan mengalami penurunan menjadi Rp 114,9 trilyun (5,7 % PDB). Secara rata-rata jumlah alokasi dana perimbangan secara absolut mengalami pertumbuhan rata-rata 25 persen pada periode anggaran

1999/2000 sampai 2004, sementara rasio terhadap PDB mengalami pertumbuhan sebesar 13,6 persen per tahun anggaran.

Kecenderungan peningkatan dana perimbangan yang terjadi menunjukkan peningkatan wewenang pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pembangunan di wilayahnya. Seperti disampaikan di depan bahwa hal ini disamping berpotensi dalam peningkatan efisiensi alokasi sumberdaya, peningkatan produktivitas dan pemerataan pembangunan, juga berpotensi terjadi distorsi yang besar terutama menyangkut target-target dan prioritas nasional. Selain itu bentuk-bentuk investasi jangka panjang, pengembangan riset dan teknologi, pengembangan SDM dan pelayanan sosial juga dapat mengalami penurunan.

Belanja pemerintah daerah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi belanja rutin dan belanja pembangunan. Melalui belanja pembangunan inilah sebenarnya yang diharapkan menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian penentuan alokasi anggaran pembangunan antar sektor sangat menentukan kinerja sektor tersebut. Perubahan alokasi anggaran pembangunan antar sektor akan menyebabkan terjadinya perubahan alokasi sumberdaya, penyerapan tenaga kerja sektoral dan kontribusi sektoral terhadap produk domestik regional.

Sarundajang (2001) menyatakan bahwa salah satu hal yang belum diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 adalah tentang tipologi

daerah, dimana masing-masing daerah memiliki keragaman potensi sumberdaya alam maupun kekhususan-kekhususan lainnya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pemberian otonomi luas secara merata pada masing-masing daerah akan dikhawatirkan menyebabkan terjadinya kesenjangan yang tajam antara daerah yang kaya dengan yang miskin sehingga dapat menyebabkan ketidakadilan.

Munculnya otonomi daerah dapat menimbulkan permasalahan seperti penyimpangan DAU Tahun 2001 sebesar 40 % yang erat kaitannya dengan kemampuan manajemen keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah, khususnya kesulitan dalam pengaturan DAU. Terlepas dari adanya dugaan penyimpangan DAU, daerah-daerah memiliki penafsiran sendiri mengenai otonomi daerah. Daerah memiliki perbedaan dalam mengartikan dan menafsirkan soal DAU. Ada daerah yang beranggapan bahwa DAU merupakan hibah yang diberikan pusat ke daerah tanpa ada pengembalian. Daerah lain mengartikan bahwa DAU tidak perlu dipertanggungjawabkan karena DAU merupakan konsekuensi dari penyerahan kewenangan atau tugas-tugas umum pemerintahan ke daerah. Sementara daerah lainnya beranggapan bahwa DAU harus dipertanggungjawabkan, baik ke masyarakat lokal maupun ke pusat, karena DAU berasal dari APBN.

Menurut Kustituantio dan Yansekardias (2001), terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah terhadap tujuan alokasi DAU. Pemerintah pusat lebih menekankan pada aspek pemerataan antar

daerah, sedangkan persepsi daerah untuk kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta, lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan minimum, pendelegasian wewenang, dan pemerataan fiskal antar daerah.

Sementara itu untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, Mahi (dalam Noni Puspita Sari dan Idhar Yahya, 2009) juga menekankan pentingnya penyempurnaan dan pemberdayaan sistem alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dapat diberikan sebagai penunjang atas sistem kerja sama antar daerah yang berlaku. Misalnya, dalam proses kerja sama daerah membutuhkan tambahan dana, maka DAK dipergunakan untuk mendukung proses kerja sama tersebut. Selain itu, disempurnakan pula DAK dengan mempertimbangkan usulan kegiatan pembangunan prasarana daerah dengan perbaikan menggunakan metode *variable matching rate*.

c. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi daerah menurut UU No. 25 Tahun 1999 pasal 3 meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, dan (4) Lain-lain penerimaan yang syah. Adapun menurut UU No.33 Tahun 2004 agak berbeda, dimana sumber penerimaan ini dipilah menjadi pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari: sisa lebih perhitungan anggaran daerah,

penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu wujud dari desentralisasi fiskal untuk memberikan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya. Sumber-sumber PAD adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya, dan pendapatan asli daerah lainnya yang syah. Kewenangan daerah dalam memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan ditindaklanjuti dengan PP No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah (Sidik, 2002). Berdasarkan Undang-Undang tersebut daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi dengan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut di hampir semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang baik. Selain itu pemerintah kabupaten dan kota juga diberi kewenangan untuk memungut jenis pajak dan retribusi lainnya sesuai kriteria tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.

Dengan adanya kewenangan tersebut, pada pelaksanaannya banyak terjadi penetapan pungutan pajak dan retribusi yang dikemudian hari justru menimbulkan masalah. Hal ini dikarenakan banyak jenis-jenis pungutan yang dulu telah dihapus / dilarang, dihidupkan kembali

dengan dalih untuk mendongkrak perolehan PAD. Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan kriteria pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah, sehingga apabila ada pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dapat ditarik atau dibatalkan.

2) Dana Perimbangan

Untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) antara pusat dan daerah dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*) (Sidik, 2002). Dana perimbangan antara pusat dan daerah menurut UU No.25 Tahun 1999 meliputi: (1) bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumberdaya alam, (2) dana alokasi umum, dan (3) dana alokasi khusus. Sedangkan menurut UU No.33 Tahun 2004, dana perimbangan ini lebih besar proporsinya untuk daerah yang terdiri dari: dana bagi hasil, dana lokasi umum, dan dana alokasi khusus. Namun konteks penelitian ini masih mengacu pada pelaksanaan UU No.25 Tahun 1999.

Perimbangan pendapatan negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10 persen untuk pemerintah pusat dan 90 persen untuk daerah. Penerimaan negara dari bea atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20 persen untuk pemerintah pusat dan 80 persen untuk pemerintah daerah. Penerimaan negara dari sumberdaya alam

sektor kehutanan, pertambangan umum dan sektor perikanan dibagi dengan imbang 20 persen untuk pemerintah pusat dan 80 persen untuk daerah. Penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi yang berasal dari wilayah daerah, setelah dikurangi pajak dibagi 80 persen untuk pemerintah pusat dan 20 persen untuk daerah, sementara untuk pertambangan gas alam 70 persen untuk pemerintah pusat dan 30 persen untuk daerah (UU No. 25 Tahun 1999).

Jika dilihat dari mekanisme bagi hasil sebagaimana di atur dalam UU No. 25 Tahun 1999, terdapat potensi yang mempertajam terjadinya ketimpangan antar daerah. Pada daerah-daerah yang kaya dengan sumberdaya alam (minyak dan gas bumi) dan juga potensi perolehan pajak yang tinggi akan memperoleh pendapatan yang besar sementara untuk daerah yang miskin akan menyebabkan kemampuan keuangan daerah menjadi sangat terbatas.

Untuk mengatasi ketimpangan horisontal antar daerah, ditempuh melalui mekanisme pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Penentuan kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan menggunakan konsep *fiscal gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah (*fiscal needs*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dengan demikian DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi potensi penerimaan. Berdasarkan konsep *fiscal gap*, daerah

yang memiliki kemampuan relatif besar akan memperoleh DAU lebih kecil dari daerah yang kurang. Dengan konsep ini sebenarnya suatu daerah yang kaya berpeluang untuk memperoleh DAU negatif. Kebutuhan daerah dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, kepadatan penduduk dan jumlah masyarakat miskin. Sementara potensi ekonomi daerah diindikasikan dengan variabel potensi industri, SDA, SDM, dan PDRB (Sidik, 2002).

Pada prinsipnya, seperti disebut Saragih (2003), ada lima hal mendasar yang harus dilakukan daerah dalam mengelola bantuan pusat. Pertama, *acceptable*, artinya dana tersebut harus mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat. Kedua, *accountable*, yaitu penggunaan dana pusat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan. Ketiga, *profitable*, memberikan manfaat dan nilai tambah tertentu bagi kegiatan perekonomian masyarakat. Keempat, *sustainable*, hasilnya dapat lestari dan berkelanjutan. Kelima, *replicable*, yakni pengelolaan dana dan kelangsungan hasilnya harus dapat dikembangkan oleh semua anggota masyarakat yang ada. Sebagai salah satu derivatif pembiayaan desentralisasi fiskal, DAU berperan besar menentukan berhasil tidaknya otonomi daerah.

Lebih lanjut Sidik (2002), menyatakan untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran, maka perhitungan DAU disamping menggunakan formula

fiscal gap juga dengan formula faktor penyeimbang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2001. Menurut Prasjo (2001), perlu diperkenalkan perimbangan keuangan horizontal, dengan tujuan utamanya adalah kesamaan kemampuan keuangan antar daerah (*fiscal equity*). Sejatinya dibutuhkan penetapan secara rinci dan tepat kemampuan keuangan (*fiscal capacity*) dan kebutuhan keuangan (*fiscal need*), sehingga dapat ditentukan daerah mana yang terletak dibawah rata-rata dan diatas rata-rata dengan membandingkan *fiscal capacity* dan *fiscal need*. Hal ini diperlukan agar kekuatan keuangan daerah propinsi miskin dapat diangkat sampai 95 persen rata-rata kekuatan keuangan seluruh daerah propinsi di Indonesia.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus, yang meliputi: kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus DAU seperti kebutuhan di kawasan transmigrasi, investasi baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil dan lain sebagainya, dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional, termasuk di dalamnya adalah kegiatan penghijauan dan reboisasi.

Selain DAU dan DAK, bentuk lain hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Jika dana perimbangan bisa diartikan sebagai *block grand*

atau transfer dari pemerintah pusat ke daerah, pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan masih diatur oleh pemerintah pusat. Bentuk hubungan ini dapat dikatakan seperti *join venture* antara pemerintah pusat dan daerah. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi sebagai tuntutan otonomi daerah. Karena tugas tersebut sebenarnya adalah tugas pemerintah pusat, maka pelimpahan wewenang disertai dengan pembiayaan yang berasal dari APBN. Sementara hubungan tugas perbantuan sebenarnya mirip dengan dekonsentrasi hanya sasarannya adalah pemerintah daerah dan desa serta sifatnya bukan pelimpahan wewenang tetapi penugasan (Sidik, 2002).

4) Pinjaman Daerah

Sebagai salah satu bentuk desentralisasi fiskal, daerah dapat meminjam baik dari pusat atau lembaga keuangan dalam negeri maupun luar negeri dengan persetujuan pemerintah pusat. Pinjaman jangka panjang digunakan untuk pembiayaan pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran pinjaman serta memberikan manfaat bagi pelayanan umum. Pinjaman jangka pendek hanya dilakukan dalam rangka pengelolaan kas daerah (Sidik, 2002).

Menurut Sabirin (2003) salah satu faktor yang menghambat ekspansi kredit perbankan ke sektor produktif selama tahun 2002 adalah

adanya berbagai Perda dan pajak atau retribusi daerah yang saling tumpang tindih. Jadi, daerah mengalami kesulitan menciptakan iklim yang kondusif, sehingga beberapa kebijakan pemerintah daerah justru menghambat aliran dana guna membiayai pembangunan. Selain itu pemerintah juga perlu mengatur mekanisme pinjaman daerah ini secara jelas, misalnya mekanisme mengenai *repayment/disbursement* terhadap pokok pinjaman, bunga dan resiko terhadap perubahan nilai kurs (Sidik, 2002).

d. Ukuran Keberhasilan Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal di tingkat Kabupaten/Kota pada umumnya diukur dari besarnya persentase sumbangan Pendapatan asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan daerah (APBD) (Kuncoro, 2004). Semakin rendah PAD berarti semakin menunjukkan besarnya ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat. Dengan kata lain, derajat kemandirian daerah masih rendah. Selain PAD, derajat desentralisasi fiskal juga biasa diukur dari persentase dana perimbangan, khususnya persentase sumbangan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap total penerimaan daerah dan persentase sumbangan bagi hasil terhadap total penerimaan daerah (Dwiyanto, 2003). DAU yang diterima daerah merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua daerah kabupaten/kota dengan tujuan untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya. Meskipun DAU merupakan transfer pusat terhadap daerah bukan berarti kemandirian

daerah dalam menggunakan dana tersebut terbatas. Hal ini sesuai dengan prinsip untuk mengatasi *horizontal imbalance* dimana penggunaan DAU ditetapkan sepenuhnya oleh daerah yang bersangkutan (Kuncoro, 2004). Dengan demikian daerah memiliki keleluasaan/kemandirian untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber pembiayaan yang berasal dari dana perimbangan tersebut sesuai dengan kepentingan daerah. Demikian juga halnya dengan penerimaan yang berasal dari dana bagi hasil. Besarnya alokasi DAU dan Dana bagi hasil dapat menjadi indikator derajat desentralisasi fiskal karena sesungguhnya dana perimbangan adalah dana daerah yang kewenangan pengalokasiannya berada di tangan pusat (Dwiyanto, 2003).

Namun persoalan yang seringkali muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah terjadinya distorsi/kesenjangan pemahaman mengenai otonomi daerah itu sendiri, baik di kalangan pejabat pemerintah maupun *stakeholders*. Dengan berpatokan pada ukuran-ukuran finansial tersebut, pemerintah daerah seringkali terjebak pada upaya menaikkan PAD melalui kenaikan tarif pajak dan retribusi daerah. Namun disisi lain, rendahnya PAD dan dana bagi hasil, serta besarnya DAU dan pinjaman daerah merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menilai seberapa tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat. Dengan semakin tinggi ketergantungan daerah berarti daerah kurang memiliki keleluasaan untuk merumuskan dan mengalokasikan sumber daya dan dana sesuai dengan aspirasi daerah. Terbatasnya kewenangan dan keleluasaan

pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan mendistribusikan sumberdaya tersebut jelas mencerminkan belum terlaksananya desentralisasi fiskal di daerah.

Bird dan Vaillancourt (dalam Noni Puspita Sari dan Idhar Yahya, 2009) memaparkan tentang bagaimana seharusnya kita mengukur keberhasilan desentralisasi fiskal. Seberapa jauh desentralisasi ini dapat dinilai antara lain dengan melihat apakah yang sudah dilakukan lebih bersifat dekonsentrasi, delegasi atau devolusi. Selain itu juga perlu melihat apakah sudut pandang yang digunakan untuk mengamati desentralisasi itu dari atas (*top down*) atau dari bawah (*bottom up*). Pendekatan desentralisasi fiskal dari bawah ke atas, pada umumnya menekankan nilai politis misalnya perbaikan pemerintahan dalam kaitannya dengan kemauan menerima saran dan partisipasi politik lokal, dan efisiensi alokasi dalam arti perbaikan kesejahteraan. Pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up*) ini sejalan dengan tujuan desentralisasi fiskal di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Sidik (2002) adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan alokasi efisiensi pengalokasian sumberdaya nasional maupun kegiatan pemerintah daerah, (2) dapat memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal dan memobilisasi pendapatan secara regional; (3) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah; (4) memperbaiki keseimbangan fiskal antar daerah dan memastikan adanya pelayanan

masyarakat yang berkualitas di setiap daerah; (5) menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Sedangkan pendekatan dari atas ke bawah (*top down*) dasar pemikirannya adalah meringankan beban pemerintah pusat dengan mengalihkan defisit ke bawah (Bird dan Vaillancourt, dalam Noni Puspita Sari dan Idhar Yahya, 2009). Apapun dasar pemikirannya, pendekatan *top down* ini menekankan bahwa kriteria utama untuk mengevaluasi desentralisasi fiskal adalah seberapa baik hal ini dapat membantu tercapainya tujuan-tujuan nasional, seperti untuk menegaskan kembali kontrol makro ekonomi dan untuk menjamin sumber-sumber yang cukup bagi pusat untuk tujuan-tujuan nasional misalnya pembangunan infrastruktur penting antar daerah.

Dari berbagai pandangan tersebut, dalam penelitian ini keberhasilan desentralisasi fiskal ditinjau dari kacamata daerah, yakni seberapa besar kebijakan tersebut memberikan kontribusi terhadap kapasitas keuangan daerah yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan tidak mengurangi aspek makro ekonomi yang dapat mengakibatkan ketimpangan antar daerah di Indonesia.

Dalam penelitian ini, indikator derajat desentralisasi fiskal yang dianggap lebih relevan dan mudah dipahami adalah seberapa besar tingkat kemandirian daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangannya, besarnya persentase DAU dan Dana bagi hasil yang diterima masing-

masing Kabupaten/Kota yang penggunaannya sesuai dengan aspirasi daerah. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut : kewenangan dalam penetapan basis pajak dan retribusi, kewenangan dalam penetapan tarif pajak dan retribusi, kewenangan dalam penetapan jenis pajak dan retribusi, kewenangan dalam penetapan program dan kewenangan dalam penetapan anggaran.

2.3. Anggaran Daerah

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut yang disusun secara matang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas Negara. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan Negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran (Ghozali, 1997). Berbagai definisi atau pengertian anggaran menurut Djayasinga dalam Nurul (2008) antara lain:

- a. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan Pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah.
- b. APBD menggambarkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang diharapkan terjadi dalam satu tahun kedepan yang didasarkan atas realisasinya masa yang lalu.

- c. APBD merupakan rencana kerja operasional Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan dalam satuan angka rupiah. APBD ini merupakan terjemahan secara moneteris dari dokumen perencanaan daerah yang ada dan disepakati yang akan dilaksanakan selama setahun.

Penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan (BPKP dalam Kawendar, dkk 2008) sebagai berikut:

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, transparansi anggaran merupakan hal yang penting, APBD merupakan salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek.

2. Disiplin anggaran

Anggaran yang disusun perlu diklasifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan anggaran

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proporsional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.

4. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan efektifitas.

5. Disusun dengan pendekatan kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait.

Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut. Anggaran merupakan alat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan (Arif, 2002). Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya.

Menurut Susanti (2008) bahwa anggaran tidak hanya sebagai rencana keuangan yang menetapkan biaya dan pendapatan pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan tetapi juga merupakan alat bagi manajer tingkat atas

untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannya.

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Sedangkan APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (UU Keuangan Negara, 2002).

2.4. Belanja Modal

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah

komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (2001) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

2.5. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (1996), pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan dasar untuk pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan memprioritaskan: perbaikan infrastruktur; peningkatan pendidikan; pelayanan kesehatan; membangun fasilitas yang dapat mendorong investasi baik asing maupun lokal; menyediakan perumahan dengan biaya rendah; melakukan restorasi lingkungan serta penguatan di sektor pertanian (Saad, 2009).

2.6. Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, Propinsi maupun Kabupaten/Kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara teori dapat dijelaskan bahwa PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga dengan demikian perubahan yang terjadi di tingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya.

Hasil penelitian Valadkhani (dalam Noni Puspita Sari dan Idhar Yahya, 2009) yang dilakukan di Iran, menemukan bahwa belanja modal pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDB, khususnya di sektor produksi barang. Sementara penelitian di negara-negara OECD diperoleh bukti empiris bahwa terjadi korelasi positif struktural antara belanja publik dengan PDB per kapita (Lamartina, dalam Noni Puspita Sari dan Idhar Yahya, 2009).

2.7. Penelitian Terdahulu

Peneliti sebelumnya seperti Mutiara Maemunah (2006) yang meneliti di Sumatra, Bambang Kesit Prakosa (2004) yang meneliti di DIY dan Jawa Tengah, Syukriy & Halim (2003) yang meneliti di Jawa dan Bali memperoleh hasil yaitu PAD dan DAU signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Noni Puspita Sari (2009) yang meneliti di Riau memperoleh hasil yaitu DAU memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung.

Sedangkan PAD menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Belanja Langsung, bahwa PAD secara individual tidak mempengaruhi belanja langsung.

Penelitian dilakukan oleh Bambang Kesit Prakosa (2004) pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan DIY. Hasil menunjukkan bahwa sandaran Pemda untuk menentukan jumlah belanja daerah suatu periode berbeda. Dalam tahun bersamaan, PAD lebih dominan dari pada DAU, tetapi untuk satu tahun kedepan, DAU lebih dominan. Munculnya berbagai bentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah mungkin merupakan indikasi untuk “mengimbangi” pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat (salah satunya DAU).

Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di pulau Sumatra (Maemunah, 2006). Tujuan Penelitian ini untuk memberikan bukti empiris pada (1) pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah Kabupaten/Kota di pulau Sumatera; (2) kemungkinan terjadinya *flypaper effect* pada belanja pemerintah Kabupaten/Kota di pulau Sumatera; (3) kecenderungan *flypaper effect* menyebabkan peningkatan jumlah belanja daerah; (4) kemungkinan adanya perbedaan *flypaper effect* antara Pemerintah Kabupaten/Kota yang PAD-nya tinggi dengan Pemerintah Kabupaten/kota yang PAD-nya rendah; dan terakhir (5) pengaruh DAU dan PAD pada kategori pengeluaran sektor yang berhubungan langsung dengan publik (belanja bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum). Berdasarkan

tujuan yang hendak dicapai, maka ada lima simpulan yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: Pertama, besarnya nilai Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi besarnya belanja daerah (pengaruh positif). Kedua, telah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera. Ketiga, terdapat pengaruh *flypaper effect* dalam memprediksi belanja daerah periode kedepan. Keempat, tidak terdapat perbedaan terjadinya *flypaper effect* baik pada daerah yang PAD-nya rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi di Kabupaten/Kota di pulau Sumatera. Kelima atau terakhir, tidak terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah bidang Pendidikan, tetapi telah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah bidang Kesehatan dan bidang Pekerjaan Umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Sheila Ardhian Nuarisa (2013) menguji Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: PAD berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Variabel DAU berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Dan variable DAK berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Sehingga pemerintah pusat sebaiknya memberikan kegiatan atau program yang lebih banyak kepada pemerintah daerah agar program tersebut dapat mensejahterakan dan memajukan pemerintah daerah.

2.8. Pengembangan Hipotesis Penelitian

a. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own source revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan (misalnya Aziz et al; Blackley; Joulfaian & Mokeerjee; Legrensi & milas; Von Furstenberg et al, dalam Nuarisa, 2013). Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan (terutama pajak) akan memengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax spend hyphotesis* (Aziz et al; Doi; Von Furstenberg et al, dalam Nuarisa, 2013). Dalam hal ini pengeluaran Pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Hipotesis untuk menguji pengaruh PAD terhadap BM Pemda kabupaten/kota di pulau Jawa adalah sebagai berikut:

Ha1: Terdapat pengaruh PAD terhadap Belanja Modal.

b. Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan diuji secara empiris (Chang & Ho, dalam Nuarisa, 2013). Holtz-Eakin et al, dalam Nuarisa (2013) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pempus dengan belanja pemerintah daerah. Studi Legrensi dan Milas (dalam Nuarisa, 2013), menggunakan sampel municipalities di Italia,

menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemda dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*.

Gamkhar dan Oates (dalam Nuarisa, 2013) menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer (*cut in the federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Hal tersebut juga tidak berbeda dengan hasil penelitian Sukriy & Halim (2004). Berdasarkan konsep dan temuan-temuan tersebut di atas, maka hipotesis alternatif untuk melihat pengaruh DAU tahun berjalan (DAU) terhadap Belanja daerah tahun berjalan (BM) untuk Pemda kabupaten/kota di pulau Sumatera adalah sebagai berikut:

Ha2: Terdapat pengaruh DAU terhadap Belanja Modal.

c. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemda meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002). Tidak efektifnya berbagai perda baru (terkait dengan retribusi dan pajak) selama tahun 2001 bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan

kesungguhan pemda dalam meningkatkan mutu layanan publik (Lewis, 2003). Wurzel (dalam Nuarisa, 2013) menegaskan meskipun mempunyai kewenangan untuk menarik pajak dan retribusi (*charge*), kewenangan ini perlu dipertimbangkan untung-ruginya (*cost and benefit*), misal dalam penentuan tarif layanan publik. Keengganan masyarakat untuk membayar pajak ataupun retribusi bisa jadi disebabkan kualitas layanan publik yang memprihatinkan. Akibatnya produk yang seharusnya bisa dijual justru direspon negatif (Mardiasmo, 2002).

Berbagai belanja yang dialokasi pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk itu, untuk kepentingan jangka pendek, pungutan yang bersifat *retribusi* lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari, pungutan ini berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan (Mardiasmo 2002).

Pergeseran komposisi belanja ini, juga digunakan untuk pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Wong (2004) menunjukkan pembangunan sektor industri tertentu (dalam hal ini sektor jasa dan retail) memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan pajak. Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka menemukan adanya korelasi yang kuat antara *share* (belanja) investasi pada infrastruktur dengan tingkat desentralisasi. Strategi alokasi anggaran

pembangunan ini pada gilirannya mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional (Madjidi, 1997). Sehingga dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

Ha3: Terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

d. Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung diluar kontrol (kewenangan) pemerintah daerah (Sidik, 2002; Bappenas 2003). Data menunjukkan bahwa kontribusi PAD meningkat dari 6,59 % pada tahun 2001 menjadi 7,33 % pada tahun 2002 (Badan Pusat Statistik, 2004), dengan sumber utama penerimaan dari pajak daerah dan retribusi. Namun demikian, kontribusi PAD ini masih sangat kecil bila dibandingkan dengan transfer pusat (DAU dan DAK) yang mencapai 79,14 %.

Lewis (2003) menemukan terjadi kenaikan penerimaan yang cukup signifikan terkait dengan penerimaan pemda, yaitu sebesar 56 % untuk pemerintah propinsi dan 103 % untuk pemerintah kabupaten dan kota. Dari kenaikan tersebut, PAD memberikan kontribusi pada masing-masing pemda sebesar 76 % dan 46 %. Gambaran ini menunjukkan belum optimalnya pemda (khususnya kabupaten dan kota) dalam menggali potensi lokal yang dimiliki.

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan eksekutif dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003). Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemerintah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi.

Sektor-sektor industri, khususnya jasa, perlu dioptimalisasi. Pajak dan retribusi (sebagai komponen terbesar PAD) sangat terkait dengan kegiatan sektor industri. Pajak dan retribusi sebenarnya merupakan eksekutif/nilai tambah dari lebih optimalnya sektor industri ini (Kadjetmiko dan Mahi dalam Sidik, 2002). Dengan kata lain pertumbuhan domestik dari sektor ini dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya PAD (pajak dan retribusi) yang akan diterima.

Pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan PDRB. Analisis elastisitas PAD terhadap PDRB yang dilakukan oleh Bappenas (2003) pada pemerintah provinsi menunjukkan ada 12 provinsi (41,37 %) yang mempunyai nilai elastisitas ≥ 1 (lebih dari satu). Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan PDRB akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap perubahan PAD. Sedangkan provinsi yang lain perubahan PDRB-nya tidak cukup mempengaruhi perubahan PAD. Patut diduga adanya kenaikan nilai tambah PDRB lebih banyak keluar dari daerah tersebut.

Dalam era desentralisasi fiskal hal semacam ini wajar terjadi, mengingat adanya kompetisi antar pemerintah dalam memfasilitasi berbagai sektor guna memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Sebagai contoh adalah dibukanya peluang berinvestasi dengan berbagai kemudahan. Tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat (Lin dan Liu, dalam Saragih, 2003). Hipotesis yang dapat dikembangkan dari pemaparan ini adalah :

Ha4: Terdapat pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

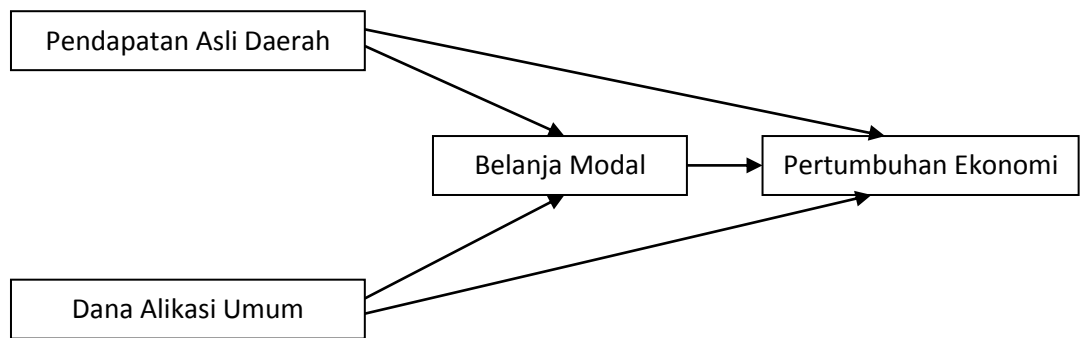
e. Pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Jika ternyata PAD berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, maka terdapat kemungkinan kuat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena nilai DAU pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi PAD. Berdasarkan penelitian Setiyawati (2007) memperoleh pengujian bahwa DAU menunjukkan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga hipotesis yang dapat dikembangkan dari pemaparan ini adalah :

Ha5: Terdapat pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2.9. Kerangka Penelitian

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Wilayah Pulau Jawa terdiri dari 6 provinsi, 85 Kabupaten dan 34 Kota. Penulis dalam penelitian mengambil seluruh populasi dengan beberapa kriteria sebagai berikut :

- a. Kabupaten/kota menyampaikan Laporan Realisasi APBD tahunan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008 hingga 2012.
- b. Kabupaten/kota mencantumkan data-data mengenai PAD, DAU dan alokasi belanja daerah pada Laporan Realisasi APBD yang digunakan dalam penelitian ini.

Jumlah Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi APBD kuartalan Tahun 2008 hingga 2012 kepada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 119 Kabupaten/Kota di Provinsi Wilayah Pulau Jawa.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Wilayah Pulau Jawa yang diperoleh dari Situs Dirjen

Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet. Dari laporan Realisasi APBD diperoleh data mengenai jumlah pertumbuhan ekonomi, alokasi Belanja modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sensus dengan mengambil seluruh populasi yaitu sebanyak Kabupaten/Kota di Provinsi Wilayah Pulau Jawa.

3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan dasar untuk pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan memprioritaskan: perbaikan infrastruktur; peningkatan pendidikan; pelayanan kesehatan; membangun fasilitas yang dapat mendorong investasi baik asing maupun lokal; menyediakan perumahan dengan biaya rendah; melakukan restorasi lingkungan serta penguatan di sektor pertanian.

3.4.2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

3.4.3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Bastian (2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari pos belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari tahun 2007 sampai dengan 2009. Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

$$\text{PAD} = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$$

3.4.4. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Halim, 2009). Dana Alokasi Umum (DAU)

diperoleh dengan melihat dari Dana Perimbangan yang ada di Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

3.5. Metode Analisis

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yaitu analisis yang merinci dan menjelaskan keterkaitan data penelitian dalam bentuk kalimat. Analisis deskriptif bertujuan mengubah kumpulan data mentah menjadi mudah dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas. Data yang terkumpul dalam penelitian akuntansi, biasanya memiliki nilai yang beragam sehingga akan sulit dan kurang bermakna bila harus mengartikan tiap nilai yang diperoleh. Sebagai alternatif maka digunakan suatu nilai yang cenderung merupakan nilai sentral yang mewakili semua data. Data tersebut biasanya tercantum dalam bentuk tabel dan kemudian di analisis.

b. Analisis Induktif

Structural Equation Model (SEM)

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode *Structural Equation Model* (SEM). Perangkat lunak yang digunakan untuk analisis struktural adalah AMOS 7 dari Arbuckle dan untuk analisis deskriptif menggunakan SPSS 17. Menurut Hair *et al.* (1998:592) terdapat tujuh langkah yang harus dilakukan dalam pemodelan *SEM*, yaitu:

a) Pengembangan Model Berbasis Teori.

- b) Pembuatan Diagram Alur (*Path Diagram*).
- c) Mengkonversi Diagram Alur ke Dalam Serangkaian Persamaan Struktural.
- d) Pemilihan Matrik Input dan Teknik Estimasi atas Model yang Dibangun
- e) Menilai Kemungkinan Munculnya Masalah Identifikasi.
- f) Evaluasi Kriteria *Goodness of Fit*.

Pada langkah ini kesesuaian model dievaluasi, melalui telaah terhadap berbagai kriteria *goodness-of-fit*. Untuk itu tindakan pertama yang dilakukan adalah mengevaluasi apakah data yang digunakan dapat memenuhi asumsi-asumsi *SEM*. Apabila asumsi-asumsi ini dipenuhi, maka model dapat diuji.

Menurut Ghozali (2006), asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang dianalisis dengan pemodelan *SEM* adalah:

1) Normalitas dan Linearitas

Sebaran data harus dianalisis untuk melihat apakah asumsi normalitas dipenuhi, sehingga data dapat diolah lebih lanjut untuk pemodelan *SEM*.

2) *Outliers* (Nilai-nilai ekstrim)

Outliers adalah observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim, baik secara univariat maupun multivariat. Observasi tersebut muncul karena kombinasi karakteristik unik yang dimilikinya dan terlihat sangat jauh berbeda dari observasi lainnya.

- 3) *Multicollinearity* dapat dideteksi dari determinan matriks kovarians. Nilai determinan matriks kovarians yang sangat kecil (*extremely small*) memberi indikasi adanya masalah multikolinearitas atau singularitas. Penanganan data yang dapat dilakukan adalah dengan mengeluarkan variabel yang menyebabkan singularitas tersebut. Bila singularitas dan multikolinearitas ditemukan dalam data yang dikeluarkan itu, salah satu *treatment* yang dapat diambil adalah dengan menciptakan “*composite variables*”, untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.
- 4) Dalam analisis *SEM* tidak ada alat uji statistik tunggal untuk mengukur atau menguji hipotesis mengenai model. Umumnya terhadap berbagai jenis *fit index* yang digunakan untuk mengukur derajat kesesuaian antara model yang dihipotesiskan dengan data yang disajikan.

Kriteria untuk menerima suatu model (*data fit*) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 3.1
Kriteria Penerimaan Suatu Model

Goodness Of Fit Index	Cut of Value
X ² -Chi-square	Kecil
Probability	≥ 0,05
RMSEA	≤ 0,08
GFI	≥ 0,90
AGFI	≥ 0,90
CMIN/DF	≤ 2,00
TLI	≥ 0,95
CFI	≥ 0,95

Sumber: Ghazali, 2006

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Sebelum melakukan pembahasan mengenai data secara statistik harus terlebih dahulu memperhatikan deskripsi data Kabupaten/Kota yang telah ditentukan sebagai sampel. Kabupaten/Kota yang terpilih menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) sampel.

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa, yaitu sebanyak 119 kabupaten dan kota di Jawa. Adapun Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 26 kabupaten dan kota, hal ini dikarenakan banyak kabupaten dan kota yang memiliki data yang tidak lengkap, sehingga diindikasikan mengandung *outlier*. Sampel dengan runtut waktu sebanyak 130 data observasi yaitu dari tahun 2008-2012, adapun nama kabupaten dan kota yang menjadi sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Nama Kabupaten/Kota Sampel

No.	Daerah
1	Kabupaten Bandung
2	Kabupaten Bekasi
3	Kabupaten Bogor
4	Kabupaten Subang
5	Kabupaten Sukabumi
6	Kota Bandung
7	Kota Tasikmalaya
8	Kabupaten Blora

9	Kabupaten Brebes
10	Kabupaten Jepara
11	Kabupaten Kebumen
12	Kabupaten Magelang
13	Kabupaten Pati
14	Kabupaten Purworejo
15	Kabupaten Rembang
16	Kabupaten Tegal
17	Kota Salatiga
18	Kota Semarang
19	Kabupaten Bantul
20	Kabupaten Lamongan
21	Kabupaten Mojokerto
22	Kabupaten Nganjuk
23	Kabupaten Pamekasan
24	Kabupaten Ponorogo
25	Kabupaten Trenggalek
26	Kota Blitar

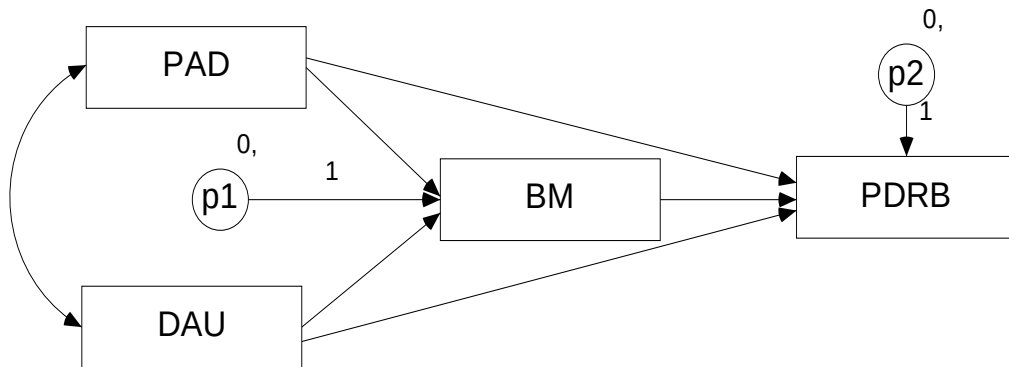
Sumber: BPS Yogyakarta, 2013

Berdasarkan tabel 4.1, dapat dilihat bahwa kabupaten /kota yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 26 kabupaten dan kota dari sebanyak 119 kabupaten dan kota yang ada di Jawa, hal ini dikarenakan banyak kabupaten dan kota yang memiliki data yang tidak lengkap, sehingga diindikasikan mengandung *outlier*. Sampel dengan runtut waktu dari tahun 2008 - 2012 yaitu sebanyak 130 data observasi.

4.2. Analisis Data

4.2.1. Analisis *Structural Equation Models* (SEM)

Berdasarkan kajian teori, maka dapat dibuat diagram alur hubungan kausalitas antar konstruk beserta indikatornya. Hubungan tersebut dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1
Hasil Rangkaian Alur SEM

Gambar 4.1 di atas memperlihatkan rangkaian alur yang dianalisis dengan bantuan program komputer Amos 7, sehingga dapat dijelaskan bentuk dari persamaan strukturalnya.

4.2.2. Persamaan Struktural dan *Measurement Model*

Persamaan struktural dari model diagram alur pada gambar 4.1. dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$BM = \beta_1 \text{ PAD} + Z_1$$

$$BM = \beta_1 \text{ DAU} + Z_2$$

$$\text{PDRB} = \beta_1 \text{ BM} + Z_3$$

$$\text{PDRB} = \beta_1 \text{ PAD} + \beta_2 \text{ DAU} + \beta_3 \text{ BM} + Z_4$$

Keterangan:

BM: Belanja Modal

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (Pertumbuhan Ekonomi)

Sedangkan spesifikasi dari model pengukuran, persamaannya dapat disusun sebagai berikut:

- Konstruk Eksogen Belanja Modal

$$X1 = \lambda_1 BM + e1$$

$$X2 = \lambda_1 BM + e2$$

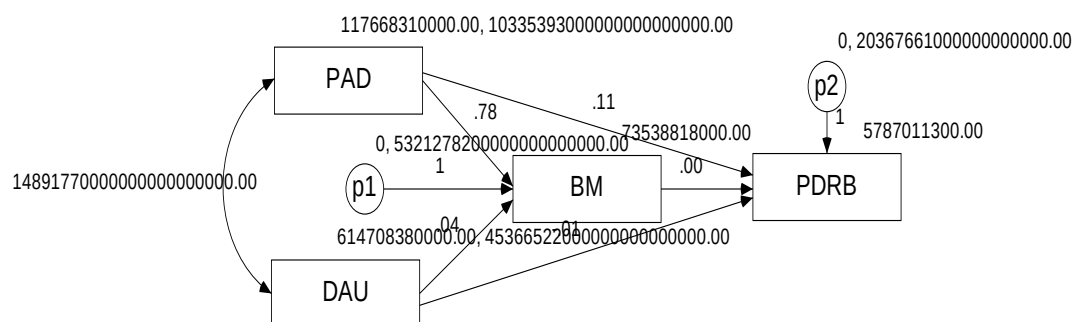
- Konstruk Endogen Belanja Modal

$$Y1 = \gamma_1 BM + e3$$

- Konstruk Endogen Pertumbuhan Ekonomi

$$Y3 = \gamma_2 PDRB + e4$$

Setelah pembentukan persamaan struktural, berikutnya dilakukan *measurement model*. Hasilnya sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.2.



Gambar 4.2
Hasil Analisis SEM

Gambar 4.2 di atas memperlihatkan hasil analisis dari SEM yang membentuk persamaan struktural dan *measurement model*.

4.2.3. Evaluasi Kriteria *Goodness of Fit*

Evaluasi kriteria *goodness of fit* terhadap model yang dihasilkan secara lengkap dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Evaluasi Normalitas Data

Evaluasi normalitas data dilakukan dengan menggunakan kriteria *critical ratio skewness value* sebesar $\pm 2,58$ pada tingkat signifikansi 0,01 (1%). Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai *critical ratio skewness value* di bawah nilai mutlak 2,58 (Ferdinand, 2000:134; Ghozali, 2004:105).

Tabel 4.2
Assessment of Normality

Variable	min	max	Skew	c.r.	kurtosis	c.r.
PAD	2.000	4.000	.154	.627	-.464	-.947
DAU	1.625	3.875	-.276	-1.147	.202	.413
BM	1.750	4.000	-.194	-.791	-.168	-.344
PDRB	1.571	4.000	-.148	-.606	-.350	-.714
Multivariate					-1.179	-.602

Sumber: Data Diolah, 2014

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.2, diketahui bahwa nilai *critical ratio skewness value* dari semua variabel berada di bawah $\pm 2,58$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dari semua variabel berdistribusi normal sehingga dapat dilakukan analisis untuk pengujian berikutnya.

b. Evaluasi *Outlier*

Evaluasi *outlier* dilakukan untuk melihat kondisi observasi dari suatu data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal ataupun variabel-variabel kombinasi (Hair *et al.* dalam Ghozali, 2004:106). Deteksi *outlier* dilakukan untuk melihat *univariate outlier* maupun *multivariate outlier*. *Univariate outlier* dideteksi dengan menggunakan dasar nilai *z-score*. Jika nilai *z-score* $\geq 3,0$ maka data observasi tersebut ada yang *outlier* (Ferdinand, 2000:134). Hasil perhitungan *z-score* dapat ditunjukkan pada tabel 4.3. dimana tidak ada yang memiliki nilai *z-score* $\geq 3,0$. Oleh karena itu, hal ini berarti tidak ada masalah *univariate outlier* pada data penelitian ini.

Tabel 4.3
Nilai Z-Score

	N	Minimum	Maximum
Z Score PAD	130	-0,49866	0,40825
Z Score DAU	130	-0,07792	0,40825
Z Score BM	130	-0,35841	-2,04124
Z Score PDRB	130	0,50645	0,40825
Valid N (listwise)	212		

Sumber : Data Diolah, 2014

Sedangkan untuk mendeteksi *multivariate outlier* dilakukan dengan melihat nilai *mahalanobis distance*. Nilai *mahalanobis distance* dibandingkan dengan nilai *chi-square* pada tingkat signifikansi 0,001. Apabila terdapat nilai *mahalanobis distance* yang lebih besar dari nilai *chi-square*, berarti terjadi masalah *multivariate outlier* (Ferdinand, 2000:135; Ghozali, 2004:106). Berdasarkan ketentuan tersebut, pada

penelitian ini nilai *chi-square* dengan tingkat signifikansi 0,001 dan *degree of freedom* 3 atau χ^2 (6,0.001) diperoleh nilai sebesar 18,805.

Tabel 4.4
Nilai Mahalanobis Distance

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
19	16.757	.005	.259
112	11.997	.017	.884
2	10.986	.027	.924
23	10.932	.027	.833

Sumber : Data Diolah, 2014

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.4, hasil perhitungan *mahalanobis distance* penelitian ini paling besar adalah 16.757, dan nilai tersebut lebih kecil dari nilai *chi-square* 18,805. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat permasalahan *multivariate outlier*. Dengan tidak adanya masalah *univariate outlier* dan *multivariate outlier*, hal ini menunjukkan bahwa data tersebut layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

c. Evaluasi *Multicollinearity* dan *Singularity*

Permasalahan *multicollinearity* dan *singularity* dapat dideteksi melalui nilai determinan matriks kovarian. Nilai determinan yang sangat kecil menunjukkan indikasi terdapatnya masalah *multicollinearity* dan *singularity* (Ghozali, 2004:109). Semakin besar nilai matriks kovarian, berarti data semakin baik. Dalam penelitian ini, nilai determinan matriks

kovarian sebesar 1,398. Nilai tersebut menunjukkan nilai determinan matriks kovarian yang besar, sehingga data yang digunakan adalah baik.

d. Evaluasi Indeks Kriteria *Goodness of Fit*

Hasil perhitungan model SEM menghasilkan indeks *goodness of fit* sebagaimana ditunjukkan tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Perhitungan *Goodness of Fit*

Kriteria	Hasil Model	Nilai Kritis	Kesimpulan
X^2 -Chi-square	5,580	Kecil	Baik
Probability	0,479	$\geq 0,05$	Baik
RMSEA	0,027	$\leq 0,08$	Baik
GFI	0,965	$\geq 0,90$	Baik
AGFI	0,946	$\geq 0,90$	Baik
CMIN/DF	0,930	$\leq 2,00$	Baik
TLI	1,590	$\geq 0,95$	Baik
CFI	1,735	$\geq 0,95$	Baik

Sumber : Data Diolah, 2014

Berdasarkan tabel 4.5, dapat dilihat bahwa semua kriteria pengujian menunjukkan hasil yang baik. Pengujian model yang dilakukan menghasilkan konfirmasi yang baik atas dimensi-dimensi faktor dan hubungan kausalitas antar faktor. Dengan demikian maka model tersebut dapat diterima.

e. Evaluasi *Regression Weight* untuk Uji Kausalitas

Hasil perhitungan estimasi nilai parameter sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Estimasi Parameter

	Estimate	S.E.	C.R.	P
BM <--- PAD	.777	.138	5.646	.000
BM <--- DAU	.442	.066	3.645	.019
PDRB <--- PAD	.106	.010	10.248	.000
PDRB <--- DAU	.009	.004	2.262	.024
PDRB <--- BM	.005	.009	.559	.576

Sumber : Data Diolah, 2014

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, nilai *critical ratio* (CR) yang identik dengan uji-t dalam regresi, tidak ada yang sama dengan nol. Hal itu berarti bahwa hipotesis nol yang menyatakan koefisien regresi antar hubungan kausalitas adalah sama dengan nol dapat ditolak. Dengan demikian maka hubungan kausalitas yang disajikan dalam model dapat diterima.

f. Analisis *Direct Effect*, *Indirect Effect*, dan *Total Effect*

Analisis ini digunakan untuk melihat kekuatan pengaruh antar konstruk, baik pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, maupun pengaruh totalnya. Menurut Ferdinand (2000:139) pengaruh langsung (*direct effect*) merupakan koefisien dari semua garis dengan anak panah satu ujung. Sedangkan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) adalah pengaruh yang muncul melalui sebuah variabel antara dan pengaruh total (*total effect*) adalah pengaruh dari berbagai hubungan. Pengaruh langsung dari model penelitian ini sebagaimana disajikan pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Standardized direct effects – Estimates

	DAU	PAD	BM
BM	.080	.703	.000
PDRB	-.192	1.057	-.053

Sumber : Data Diolah, 2014

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang memiliki pengaruh langsung terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, yaitu PAD, DAU, dan BM. Dua variabel terhadap BM, yaitu PAD dan DAU. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh langsung terbesar terhadap variabel PDRB adalah variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sebesar 1,057 dan variabel yang memiliki pengaruh langsung terbesar terhadap variabel Belanja Modal (BM) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,703.

Dalam model penelitian ini juga diukur pengaruh tidak langsung antar variabel, yaitu terdapat dua variabel yang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap variabel pertumbuhan ekonomi yaitu variabel PAD dan DAU, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.8.

Tabel 4.8
Standardized indirect effects – Estimates

	DAU	PAD	BM
BM	.000	.000	.000
PDRB	.214	1.375	.000

Sumber : Data Diolah, 2014

Dari pengukuran tersebut, diketahui bahwa ada 2 variabel yang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu

PAD dan DAU. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh tidak langsung terbesar terhadap variabel pertumbuhan ekonomi adalah variabel penapatan asli daerah (PAD), yaitu sebesar 1,375.

Oleh karena adanya pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antar variabel dalam model penelitian ini, maka perlu diukur pengaruh totalnya. Hasil pengukuran pengaruh total antar variabel sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.9.

Tabel 4.9
Standardized Total Effects – Estimates

	DAU	PAD	BM
BM	.080	.703	.000
PDRB	.022	2.432	-.053

Sumber : Data Diolah, 2014

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut diketahui bahwa variabel yang memiliki pengaruh total terbesar terhadap variabel pertumbuhan ekonomi adalah variabel pendapatan asli daerah (PAD), yaitu sebesar 2,432. Sedangkan pengaruh total terbesar terhadap belanja modal adalah variabel pendapatan asli daerah, yaitu sebesar 0,703.

4.3. Pengaruh tidak langsung PAD dan DAU terhadap PDRB Melalui BM

Pengaruh variabel PAD secara langsung terhadap PDRB mempunyai bobot sebesar 1,057. Sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung PAD terhadap PDRB melalui BM sebesar 1,375. Pengaruh variabel DAU secara langsung terhadap PDRB mempunyai bobot sebesar -0,192. Sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung DAU terhadap PDRB melalui

BM sebesar 0,214. Dengan demikian, adanya variabel belanja modal sebagai variabel *intervening* menguatkan pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.4. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis yang dilakukan pada dasarnya merupakan jawaban atas berbagai macam hubungan yang dikembangkan dalam model penelitian. Model ini menunjukkan pola hubungan yang relatif komprehensif antar berbagai variabel penelitian, baik dalam konteks hubungan langsung (*direct effect*) maupun hubungan tidak langsung (*indirect effect*). Analisis regresi dalam model ini ditentukan dengan *critical ratio*-nya (C.R.) hipotesis akan diterima bila nilai C.R. lebih dari Nilai kritik sebesar 1,96 (*Hair dkk, 1998*) pada taraf signifikansi 5%. Gambaran lengkap hasil penghitungan tampak pada tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10
Hasil Uji Hipotesis

	Estimate	S.E.	C.R.	P	
BM <--- PAD	.777	.138	5.646	.000	Ha1: Diterima
BM <--- DAU	.442	.066	3.645	.019	Ha2: Diterima
PDRB <--- BM	.005	.009	.559	.576	Ha3: Ditolak
PDRB <--- PAD	.106	.010	10.248	.000	Ha4: Diterima
PDRB <--- DAU	.009	.004	2.262	.024	Ha5: Diterima

Sumber : Data Diolah, 2014

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hipotesis 1

Dari hasil pengujian diperoleh nilai *Critical Ratio* (CR) = 5,646 dengan nilai probabilitas (sig) = 0.000 < 0.05. Dengan demikian maka H_a diterima. Artinya PAD berpengaruh positif secara signifikan terhadap BM. Berdasarkan hasil analisis jalur sub-struktur 1 (X_1 X_2 dan Y) diperoleh nilai masing-masing:

1) PY_{x1} = Beta = 0.777 [t = 5,646 dan probabilitas (sig) = 0.000

2) PY_{x2} = Beta = 0.106 [t = 10,248 dan probabilitas (sig) = 0.000

Temuan ini memberikan indikasi bahwa semakin baik PAD maka BM juga akan semakin tinggi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Darwanto dan Yulia (2007) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD. Temuan ini juga mengkonfirmasi hasil penelitian Maimunah (2006) bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di pulau Sumatera dan penelitian Abdullah dan Halim (2003) bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah pada kabupaten/kota di Jawa dan Bali..

b. Hipotesis 2

Dari hasil pengujian diperoleh nilai *Critical Ratio* (CR) = 3,645 dengan nilai probabilitas (sig) = 0.019 < 0.05. Dengan demikian maka H_a diterima. Artinya DAU berpengaruh positif secara signifikan terhadap BM.

Berdasarkan hasil analisis jalur sub-struktur 1 (X_1 X_2 dan Y) diperoleh nilai masing-masing:

1) PY_{x1} = Beta = 0,442 [$t = 3,645$ dan probabilitas (sig) = 0.019

2) PY_{x2} = Beta = 0,009 [$t = 2.262$ dan probabilitas (sig) = 0.024

Temuan ini memberikan indikasi bahwa semakin baik DAU maka BM juga akan semakin tinggi. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan Darwanto dan Yulia (2007) sebelumnya yang menyebutkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di pulau Jawa. Sementara penelitian Abdullah dan Halim yang mengambil variabel belanja pemerintah sebagai variabel independen menemukan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah di Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali.

c. Hipotesis 3

Berdasarkan nilai C.R. BM terhadap PDRB sebesar 0,559 dengan Pvalue sebesar 0,576 dimana lebih besar dari 0,05 atau Pvalue ($0,576 > \alpha$ (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa BM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB. Dengan demikian Hipotesis 3 dapat ditolak.

Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian yang dikemukakan oleh Fitriyanti dan Pratolo (2009) bahwa belanja pembangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

d. Hipotesis 4

Berdasarkan nilai C.R. PAD terhadap PDRB adalah 10,248 dengan Pvalue sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 atau $Pvalue (0,000) < \alpha (0,05)$, maka dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Dengan demikian Hipotesis 4 dapat diterima.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Brata (2004) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini juga mendukung pernyataan BAPENAS (2003) yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya sensitif terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan PDRB dan Pendapatan Per Kapita.

e. Hipotesis 5

Berdasarkan nilai C.R DAU terhadap PDRB sebesar 2,262 dengan Pvalue sebesar 0,024 dimana lebih kecil dari 0,05 atau $Pvalue (0,024) < \alpha (0,05)$, maka dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Dengan demikian Hipotesis 5 dapat diterima.

Hasil ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Maryati dan Endrawati (2010) yang menemukan bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

4.5. Pembahasan

a. Hipotesis I dan IV

Berdasarkan pengujian SEM yang telah dilakukan maka diketahui bahwa terdapat pengaruh positif PAD terhadap BM dan PDRB. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan kemandirian PAD, sebab semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, bukan sumber pendapatan dari bantuan, maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan Pendapatan Daerah. Semakin besar upaya maksimalisasi Pendapatan Asli daerah yang dilakukan suatu daerah, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakannya. Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengertian bahwa keleluasaan yang dimiliki oleh daerah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang baru. PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan. Pemerintah daerah di dalam membiayai belanja

daerahnya, selain dengan menggunakan transfer dari pemerintah pusat, mereka juga menggunakan sumber dananya sendiri yaitu PAD.

b. Hipotesis II dan V

Berdasarkan pengujian SEM yang telah dilakukan maka diketahui bahwa terdapat pengaruh positif DAU terhadap BM dan pengaruh positif DAU terhadap PDRB, hal ini dapat dijelaskan bahwa dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan pada Kabupaten/Kota di pulau Jawa adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pada Kabupaten/Kota di pulau Jawa. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

Studi yang dilakukan oleh Legrenzi & Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2004) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang, transfer berpengaruh terhadap anggaran belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam

pengeluaran anggaran belanja modal. Pada riset ini, pengaruh positif DAU terhadap anggaran belanja modal disebabkan oleh porsi DAU yang dikucurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota di pulau Jawa pada tahun 2005 besarnya 5.6% dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Pada tahun 2006 besarnya DAU sebesar 5.9% dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Pada tahun 2007 besarnya DAU yang diakokasikan sebesar 6% dari total DAU yang dikucurkan di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan perkembangan DAU yang terus meningkat untuk Kabupaten/Kota di Pulau Jawa (www.depkeu.djpk.go.id).

c. Hipotesis III

Berdasarkan pengujian SEM yang telah dilakukan maka diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh BM terhadap PDRB, hal ini dapat dijelaskan bahwa variabel anggaran belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi yang diproksikan oleh PDRB tidak berpengaruh signifikan pada Kabupaten Kota di pulau Jawa. Hasil ini juga konsisten dengan riset yang dilakukan oleh Darwanto (2007) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh anggaran belanja modal yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan data anggaran belanja modal mengalami penurunan, tetapi sebaliknya PE_PDRB justru mengalami peningkatan.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan

prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja modal hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik, hal ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja pemerintah daerah untuk berbagai kepentingan publik. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. Pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh PAD terhadap BM Kabupaten dan kota di pulau Jawa adalah nilai *Critical Ratio* (CR) = 5,646 dengan nilai probabilitas (sig) = 0.000 < 0.05. Dengan demikian maka H_a diterima. Artinya PAD berpengaruh positif secara signifikan terhadap BM. Dengan demikian Hipotesis 1 dapat diterima.
2. Nilai C.R. untuk pengaruh DAU terhadap BM adalah sebesar 43,645 dengan nilai probabilitas (sig) = 0.019 < 0.05. Dengan demikian maka H_a diterima. Artinya DAU berpengaruh positif secara signifikan terhadap BM. Dengan demikian Hipotesis 2 dapat diterima.
3. Nilai C.R. untuk pengaruh BM terhadap PDRB adalah sebesar 0,559 dengan Pvalue sebesar 0,576 dimana lebih besar dari 0,05 atau Pvalue (0,576) > α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa BM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB. Dengan demikian Hipotesis 3 dapat ditolak.
4. Nilai C.R. untuk pengaruh PAD terhadap PDRB adalah sebesar 10,248 dengan Pvalue sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 atau Pvalue (0,000) < α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh

positif dan signifikan terhadap PDRB. Dengan demikian Hipotesis 4 dapat diterima.

5. Nilai C.R. untuk pengaruh DAU terhadap PDRB adalah sebesar 2,262 dengan Pvalue sebesar 0,024 dimana lebih kecil dari 0,05 atau Pvalue $(0,024) < \alpha (0,05)$, maka dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Dengan demikian Hipotesis 5 dapat diterima.

5.2. Keterbatasan

1. Hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisirkan terhadap kabupaten/kota di pulau lain dikarenakan pengambilan sampel kabupaten/kota pulau Jawa yang mempunyai beberapa kekhususan dalam hal pembiayaan pembangunan selama rentang waktu penelitian, yaitu adanya dana rehabilitasi dan rekonstruksi dipulau Jawa pasca bencana alam. Disamping itu banyaknya daerah pemekaran baru yang tidak ikut di teliti karena tidak memiliki data yang disyaratkan.
2. Pendeknya rentang waktu penelitian, yaitu dari tahun 2008 – 2012 diduga turut mempengaruhi hasil penelitian, karena umumnya pertumbuhan ekonomi atau peningkatannya akan lebih terlihat dalam rentang waktu beberapa tahun. Terlebih lagi angka PDRB untuk tahun 2012 adalah angka PDRB sementara.

3. Dalam hal variabel penelitian, hanya tiga variabel yang diteliti yang diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu PAD, DAU dan belanja modal.

5.3. Saran

Dengan melihat hasil penelitian serta keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, maka disarankan sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah provinsi agar membuat regulasi atau Peraturan Gubernur terkait dengan penganggaran belanja modal yang bersumber dari otonomi khusus (otsus) dan melakukan serah terima aset tetap dari kabupaten/kota yang sudah dibangun di daerah tersebut.
2. Kepada pemerintah kabupaten/kota provinsi di pulau Jawa:
 - a. Supaya lebih mengintensifkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan PAD secara langsung sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Supaya memprioritaskan alokasi DAU dan belanja modal pada bidang-bidang yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik, seperti infrastruktur atau fasilitas-fasilitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Kepada peneliti yang selanjutnya :

- a. Untuk mengambil sampel yang lebih banyak dengan rentang waktu lebih lama dan menambahkan variabel-variabel lainnya, seperti bagi hasil migas dan DAK.
- b. Menghitung terlebih dahulu berapa alokasi DAU yang bisa dialokasikan untuk belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bahtiar. 2002. *Akuntansi pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Salemba 4.
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit. Salemba 4: Jakarta.
- Boediono. 2002. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Asas Desentralisasi Fiskal. *Paper disampaikan pada Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional*: Jakarta
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit PT. Indeks: Jakarta.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, *Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Hassanudin*, Makassar, 26-28 Juli.
- Dwiyanto, Agus. 2003. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM: Yogyakarta
- Fozzard, Adrian. 2001. The Basic Budgeting Problem: Approaches to Resource Allocation in the Public Sector and Their Implications for Pro-Poor Budgeting. Center for aid and Public expenditure, Overseas Development Institute (ODI), *Working Papper*, No. 147
- Ghozali, Imam, dan Arifin Sabeni. 1997. *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan*. Edisi 4. Penerbit BPFE: Yogyakarta.
- _____. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____ dan Halim, Abdul. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali*, Simposium Nasional Akuntansi VI:1140-1159, Surabaya 16-17 Oktober.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba 4 : Jakarta.

- Isdijoso, Brahmantio, Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta), *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. 6 No. 1, 2002.
- Kadjetmiko. 2002. Dinamika Sumber Keuangan Bagi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah, *Prosiding Workshop Internasional Implementasi Desentralisasi Fiskal Sebagai Upaya Memberdayakan Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan. Bandung
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit UNDIP: Semarang.
- Kuncoro, M., 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Nuarisa, Sheila Ardhian. 2013. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 1, No. 3
- Nugroho, Suratno,. 2010."Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". *Skripsi Sarjana (dipublikasikan)*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Nurkholis. 2001. Peencanaan Strategik Organisasi Pemerintahan Dengan Pendekatan Balanced Scorecard. *Jurnal Lintas Ekonomi*. Vol. 18, No. 1.
- Prakosa, Bambang Kesit. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empiris di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. *JAAI*, Vol. 08 No. 2.
- Pramusinto, Agus. 2001. Paradok-paradok Pelaksanaan Otonomi Daerah: eberapa Cacatan dari Lapangan. *Analisis CSIS*. Vol. 31, No. 4
- Prasojo, E. 2001. Perimbangan Hubungan Pusat dan Daerah : Indonesia dan Jerman dalam Perbandingan. *Analisis CSIS*. Vol. 31, No. 4

- Pratiwi, Novi. 2007. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Skripsi Sarjana (dipublikasikan)*. Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
- Sabirin, S. 2003. Prinsip-prinsip Pengendalian Hutang Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan Sekaligus Mendukung Kestabilan Ekonomi-Moneter. *Makalah disampaikan Dalam Seminar Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Penerbitan Obligasi Daerah dan Menyongsong Pembentukan DPD*. Jakarta. 31 Januari
- Saragih, Juli P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sari, Noni Puspita dan Idhar Yahya. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendaptan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung. *Skripsi Sarjana (Dipublikasikan)*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sarundajang, S.H. 2001. *Arus Balik Kekuasaan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sekaran, Uman, *Research Method for Business : A skill Building Approach*, 7th Edition, New York: John Wiley and Sons, 2002.
- Setyawati, Anis dan Hamzah, Ardi, 2007, Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 4, No. 2, Desember
- Sidik, Machfud. 2002. Kebijakan, Implementasi, dan Pandangan Ke depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, *Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional: Menciptakan Good Governance Demi Mendukung Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal*, Yogyakarta, 20 April.
- Singgih, Santoso. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Stine, William F. 2001. Is Local Government Revenue Responsibility Federal Aid Symetrical? Evidence From Pennsylvania Country Government in an Era of Retrenchment, *National Tax Journal*, Vol. 47, No. 4
- Suyono, Dikun. 2003. *Infrastruktur Indonesia, Sebelum, Selama, dan Pasca Krisis*. Bappenas. Jakarta.
- Tim Peneliti ILD. 2004. Kompilasi Undang-undang Otonomi daerah dan Sekilas Proses Kelahirannya (1903-2004). *Institute For Local Development dan Yayasan TIFA*. Jakarta.

- Triwidodo, Pambudi. 2007. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali. *Skripsi Sarjana (dipublikasikan)*. Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
- Widjaja, H.A.W. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN I; REKAPITULASI DATA PENELITIAN

No	Kode	Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Retribusi Daerah	Pendapatan Hasil Pengukuran Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	Dana Alokasi Umum	BELANJA MODAL	Belanja Tenet	Belanja Peralatan dan Meub	Belanja Gedung dan Bangunan	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Belanja Asat Tetap Lainnya	Belanja Asat Lainnya	PDRB
1	1001	Kab. Bandung	144.660.409.277,08	51.654.333.709,63	36.067.479.245,10	35.674.088.482,00	21.264.507.660,38	1.001.542.069.000,00	189.435.877.403,00	15.972.779.818,00	17.426.959.289,00	113.824.939.441,00	31.485.720.100,00	1.725.487.760,00	0,00	32.618.513,000
2	1002	Kab. Bekasi	249.069.806.936,00	105.613.220.243,00	88.392.309.715,00	10.975.965.017,00	44.182.311.961,00	525.565.565.000,00	148.105.759.478,00	7.333.952.482,00	37.879.157.461,00	19.457.881.434,00	79.838.384.652,00	3.568.410.250,00	0,00	34.375.552,000
3	1003	Kab. Bogor	307.634.448.365,00	158.833.462.605,00	111.701.692.797,00	13.810.402.411,00	29.268.909.552,00	1.062.589.558.000,00	386.061.050.660,00	12.333.456.100,00	39.876.376.328,00	90.110.179.327,00	203.601.292.740,00	2.224.700.483,00	17.915.043.710,00	12.959.070,000
4	1013	Kab. Sukung	84.034.543.366,00	17.940.089.050,00	35.759.804.245,00	4.107.800.546,00	6.226.650.625,00	618.600.128.000,00	199.756.145.614,00	489.225.000,00	30.634.662.528,00	52.814.068.689,00	107.871.740.697,00	6.787.450.700,00	0,00	9.397.832,000
5	1014	Kab. Sukabumi	87.402.424.551,00	13.596.928.718,00	44.817.421.393,00	5.852.665.675,00	23.335.108.765,00	827.153.450.000,00	149.046.523.081,00	5.352.514.550,00	46.081.843.247,00	32.209.688.797,00	64.668.752.967,00	553.725.900,00	0,00	7.038.468,000
6	1017	Kota Bandung	314.627.155.412,00	214.397.508.435,00	73.832.886.128,00	5.447.893.079,00	20.948.887.765,00	965.518.566.800,00	345.160.822.373,00	148.350.014.075,00	56.709.346.323,00	56.791.289.987,00	60.025.611.207,00	5.244.660.781,00	0,00	25.749.394,000
7	1023	Kota Tasikmalaya	63.849.140.718,00	8.572.895.585,00	47.345.521.081,00	2.365.130.694,00	5.565.593.358,00	410.130.031.400,00	109.889.061.015,50	1.289.233.784,00	22.258.069.914,50	39.415.931.140,00	44.040.919.017,00	2.930.907.160,00	0,00	11.473.915,000
8	1104	Kab. Bireu	48.554.140.914,00	7.008.511.926,00	21.593.369.011,00	1.929.145.497,00	18.423.110.480,00	478.260.120.000,00	141.456.779.115,00	101.449.400,00	25.108.328.805,00	72.093.201.941,00	42.905.846.294,00	1.246.652.875,00	0,00	3.415.000,000
9	1106	Kab. Brebes	72.073.945.369,00	14.630.524.271,00	26.719.501.739,00	2.497.471.575,00	28.226.447.784,00	716.426.703.000,00	195.181.636.921,00	6.457.130.000,00	27.815.731.299,00	63.658.160.691,00	96.133.884.081,00	1.117.321.450,00	0,00	9.551.000,000
10	1110	Kab. Jopora	71.287.501.105,00	13.941.162.661,00	44.636.581.560,00	2.331.658.590,00	10.368.317.894,00	595.641.455.000,00	156.359.600.914,00	4.141.624.125,00	17.818.844.988,00	78.179.759.921,00	46.905.589.015,00	11.493.742.865,00	0,00	6.469.000,000
11	1112	Kab. Kabumen	58.598.425.037,00	10.983.558.078,00	26.633.025.944,00	1.397.318.590,00	19.565.114.427,00	618.355.049.000,00	160.041.447.457,00	2.096.592.627,00	20.426.944.941,00	60.852.821.568,00	73.966.839.821,00	2.798.248.500,00	0,00	4.569.000,000
12	1116	Kab. Magelang	78.119.511.338,00	25.207.018.633,00	30.456.478.088,00	7.580.155.289,00	14.875.659.328,00	538.001.765.000,00	121.809.609.633,00	746.118.420,00	17.995.916.296,00	53.380.601.578,00	48.730.186.018,00	597.317.325,00	48.470.000,00	5.859.000,000
13	1117	Kab. Pati	60.495.293.672,01	12.589.740.710,60	50.983.552.927,00	2.856.446.877,00	14.095.554.057,21	603.264.353.000,00	182.415.381.557,00	878.500.500,00	19.371.866.234,00	63.259.155.382,00	77.430.613.946,00	1.485.435.495,00	0,00	6.718.000,000
14	1121	Kab. Puncerjo	51.174.650.039,00	8.402.480.625,00	34.468.896.115,00	1.455.925.294,00	8.850.178.005,00	515.798.414.000,00	108.615.979.531,00	1.112.569.359,00	8.139.137.149,00	55.323.939.408,00	41.475.520.400,00	515.722.224,00	48.200.000,00	4.651.000,000
15	1122	Kab. Rembang	51.126.558.424,00	7.622.039.604,00	33.259.696.637,00	4.487.267.722,00	5.776.555.461,00	398.410.703.000,00	123.251.536.770,00	2.101.077.000,00	19.940.539.115,00	55.981.081.195,00	44.779.147.469,00	551.642.000,00	0,00	3.606.000,000
16	1128	Kab. Tegal	59.154.639.032,00	13.210.709.518,00	31.303.155.208,00	3.714.992.253,00	10.925.782.083,00	606.452.130.000,00	191.884.274.027,00	5.288.761.000,00	15.032.659.998,00	70.793.078.271,00	98.693.019.888,00	1.536.764.800,00	0,00	5.536.000,000
17	1132	Kota Salatiga	45.147.465.953,00	7.695.573.127,00	22.321.991.734,00	1.451.640.514,00	13.378.350.608,00	225.394.715.000,00	128.481.274.235,00	7.624.709.075,00	22.095.338.350,00	21.743.780.650,00	71.474.480.440,00	1.917.076.720,00	1.625.886.000,00	1.370.000,000
18	1133	Kota Semarang	287.914.250.403,00	143.460.194.601,00	84.757.269.284,00	5.405.397.595,00	94.291.428.583,00	634.894.499.000,00	155.005.660.955,00	12.166.869.382,00	60.161.018.008,00	49.149.010.862,00	29.529.876.250,00	3.993.036.083,00	46.050.000,00	30.516.000,000
19	1201	Kab. Bantul	69.690.761.508,85	12.070.898.848,00	37.171.838.611,00	3.449.914.968,68	17.108.309.083,27	693.169.351.000,00	302.760.355.692,00	4.271.803.050,00	37.270.301.429,00	143.821.003.446,00	119.242.522.200,00	7.354.938.715,00	0,00	7.417.580,000
20	1310	Kab. Lumayan	66.608.873.942,51	14.271.468.396,00	24.300.382.597,00	12.397.880.665,77	15.639.142.263,74	599.292.383.000,00	191.930.727.595,00	4.332.268.850,00	41.641.536.560,00	83.178.869.850,00	61.004.424.575,00	873.607.500,00	0,00	7.985.000,000
21	1315	Kab. Mojokerto	55.790.363.612,51	25.930.987.213,54	17.913.194.002,35	2.462.924.699,76	9.463.357.726,86	501.520.498.000,00	204.848.512.477,00	5.604.327.402,00	33.539.125.990,00	58.425.267.600,00	97.878.870.985,00	9.094.920.500,00	0,00	12.514.000,000
22	1316	Kab. Nganjuk	60.307.577.351,84	9.351.685.594,66	38.101.751.482,44	1.737.776.253,09	12.116.061.021,45	590.050.073.000,00	163.926.064.222,00	831.088.000,00	20.451.801.063,00	61.137.907.740,00	80.640.027.876,00	865.239.550,00	0,00	7.649.000,000
23	1319	Kab. Pamekasan	38.957.759.237,87	5.929.501.643,00	19.828.940.667,25	683.485.274,81	10.515.971.652,61	447.934.892.000,00	134.092.647.414,00	2.487.832.000,00	17.353.794.314,00	83.074.896.600,00	27.944.254.500,00	2.492.080.000,00	0,00	3.475.000,000
24	1321	Kab. Ponorogo	41.850.665.707,64	9.858.326.841,00	23.871.588.756,58	732.415.619,76	7.388.351.480,30	538.559.997.000,00	178.118.633.515,70	1.735.965.000,00	26.642.550.410,30	103.008.138.973,00	48.438.807.132,40	393.472.000,00	0,00	4.929.000,000
25	1323	Kab. Trenggalek	35.187.914.595,19	6.120.714.723,00	8.562.656.691,00	1.337.056.482,47	18.777.397.018,72	465.748.300.000,00	151.951.633.871,00	13.306.200,00	21.755.278.371,00	20.637.134.300,00	56.874.271.750,00	22.651.702.250,00	0,00	3.988.000,000
26	1330	Kota Blitar	40.794.808.365,66	3.706.208.387,00	20.563.760.213,60	354.100.453,66	16.170.830.340,90	217.165.721.000,00	104.597.742.095,30	1.210.000.000,00	21.259.754.315,50	63.507.492.977,80	13.935.654.049,00	4.280.363.350,00	804.477.413,00	1.381.000,000

Sumber : Badan Pusat Statistik - DIY 2013

PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Retribusi Daerah	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	Dana Alokasi Umum	BELANJA MODAL	Belanja Tanah	Belanja Peralatan dan Mesin	Belanja Gedung dan Bangunan	Belanja Jalan, Jigasi dan Juringan	Belanja Aset Tetap Lainnya	Belanja Aset Lainnya	PDRB
153.271.649,974.00	47.951.110.528.00	41.592.879.257.00	43.280.145.688.00	20.447.514.501.00	1.080.215.507.000.00	148.975.370.067.00	12.695.390.141.00	23.686.155.753.00	78.705.278.773.00	32.797.444.000.00	1.041.101.400.00	0.00	13.272.600.000
287.299.507.395.00	107.813.509.242.00	75.669.249.864.00	26.991.358.363.00	76.825.389.926.00	618.237.958.000.00	664.800.165.388.00	1.921.560.750.00	73.728.123.729.00	168.139.817.780.00	417.497.479.446.00	3.513.165.875.00	0.00	35.541.940.000
337.903.884.379.00	167.079.071.810.00	116.502.385.407.00	16.230.267.061.00	38.092.160.051.00	1.111.979.562.000.00	510.374.974.669.00	49.174.145.485.00	71.568.671.838.00	209.723.759.370.00	178.094.788.251.00	1.763.609.725.00	0.00	14.232.423.000
67.665.304.446.00	20.147.677.694.00	8.483.829.205.00	4.936.799.493.00	34.096.998.054.00	666.926.184.000.00	168.592.432.835.00	376.554.779.00	25.272.782.790.00	69.779.033.241.00	72.301.033.825.00	863.028.200.00	0.00	10.158.571.000
80.616.078.322.80	14.681.725.044.90	4.685.945.386.00	14.481.728.683.90	14.481.728.683.90	855.787.030.000.00	148.639.730.574.80	1.902.412.893.00	47.413.071.603.00	27.568.863.178.80	71.319.570.900.00	435.812.000.00	0.00	7.448.192.000
360.152.627.690.00	250.338.673.104.00	68.912.741.347.00	7.136.408.109.00	33.764.805.130.00	989.233.620.000.00	390.988.308.073.00	95.581.602.770.00	45.784.918.991.00	182.382.366.016.00	62.500.296.951.00	4.739.123.345.00	0.00	29.625.574.000
76.503.523.370.19	9.583.828.253.00	9.795.560.453.00	3.183.053.471.00	59.941.081.193.19	431.419.690.000.00	118.847.625.132.50	460.492.450.00	17.801.783.997.50	37.417.574.486.00	61.293.133.949.00	1.874.640.250.00	0.00	12.339.625.000
49.695.650.709.00	8.116.956.841.00	23.542.075.234.00	2.291.248.882.00	15.746.369.752.00	487.316.394.000.00	69.902.568.615.00	70.240.000.00	20.122.106.400.00	14.592.073.840.00	33.634.010.975.00	1.484.137.400.00	0.00	3.637.000.000
80.275.021.213.00	15.405.412.677.00	39.384.119.604.00	2.304.464.964.00	23.181.023.968.00	716.589.942.000.00	130.717.311.894.00	2.286.166.550.00	22.329.135.850.00	46.388.980.892.00	58.877.701.852.00	835.326.650.00	0.00	11.134.000.000
71.919.859.343.00	16.024.843.459.00	9.296.167.548.00	2.525.771.485.00	44.073.076.851.00	522.061.147.000.00	90.748.385.252.00	2.530.892.465.00	17.549.519.894.00	22.785.015.234.00	42.533.974.495.00	3.184.165.350.00	2.164.867.814.00	7.456.000.000
68.016.363.174.00	10.964.523.583.00	33.532.500.437.00	1.682.743.101.00	17.816.596.053.00	638.804.310.000.00	159.361.410.093.00	1.643.018.058.00	15.963.739.015.00	87.598.638.103.00	52.749.394.876.00	1.406.620.040.00	0.00	5.306.000.000
75.582.195.900.00	21.981.355.436.00	33.411.798.787.00	8.406.251.358.00	11.782.790.319.00	596.437.825.000.00	108.098.065.518.00	249.000.000.00	6.644.696.637.00	72.210.060.500.00	28.572.911.981.00	176.814.400.00	244.584.000.00	6.588.000.000
90.667.623.138.54	14.590.185.901.00	55.228.144.260.89	5.188.800.787.00	15.660.411.789.65	621.169.150.000.00	161.139.015.196.00	0.00	12.012.916.471.00	68.505.229.039.00	79.559.040.884.00	1.051.828.802.00	0.00	7.705.000.000
60.814.316.979.00	6.818.625.592.00	9.491.483.729.00	1.516.373.373.00	42.987.834.285.00	526.622.715.000.00	110.019.923.725.00	0.00	17.403.321.985.00	53.835.319.770.00	37.690.317.270.00	1.090.964.700.00	0.00	5.378.000.000
58.887.895.318.00	9.859.879.106.00	36.008.817.228.00	4.584.864.416.00	6.434.334.568.00	407.153.671.000.00	56.894.049.901.00	610.700.000.00	11.772.186.951.00	16.075.775.680.00	26.893.834.350.00	1.541.553.000.00	0.00	4.084.000.000
70.859.594.636.00	14.045.892.624.00	10.166.068.540.00	4.450.245.848.00	42.197.387.624.00	624.981.282.000.00	142.098.559.409.00	533.428.125.00	19.511.929.311.00	66.852.550.832.00	53.530.607.541.00	1.670.043.600.00	0.00	6.407.000.000
53.055.833.309.00	9.201.402.994.00	6.843.378.023.00	1.637.844.177.00	35.373.208.115.00	236.691.342.000.00	150.495.407.426.00	37.675.851.070.00	21.675.807.340.00	36.786.990.341.00	52.730.064.275.00	735.411.900.00	891.287.500.00	1.542.000.000
306.112.422.821.00	154.505.287.140.00	69.874.090.022.00	5.467.609.974.00	76.265.435.685.00	707.635.157.000.00	216.899.611.808.00	2.916.521.000.00	50.735.623.777.00	39.023.241.398.00	118.081.195.201.00	6.137.030.434.00	0.00	34.541.000.000
88.691.362.690.38	14.108.451.478.99	58.205.951.445.00	7.512.838.194.82	8.864.121.571.57	568.502.143.000.00	107.353.190.571.00	1.265.370.800.00	16.897.162.231.00	43.274.719.225.00	44.001.821.635.00	1.914.166.680.00	0.00	8.147.860.000
71.452.396.308.29	16.537.881.443.00	25.096.757.445.00	13.713.375.128.04	16.104.382.292.25	581.718.829.000.00	206.287.004.700.00	13.903.335.125.00	23.034.270.725.00	137.839.649.700.00	30.837.005.150.00	672.745.000.00	0.00	9.124.000.000
59.633.358.366.84	28.996.000.338.55	20.704.236.197.15	2.488.675.264.76	7.444.446.566.38	502.176.671.000.00	139.741.397.302.00	1.005.792.600.00	18.056.632.989.00	53.249.070.563.00	65.591.167.150.00	1.798.729.000.00	0.00	14.453.000.000
77.274.642.864.63	10.062.661.242.34	51.873.544.356.25	2.209.560.999.17	8.128.876.266.87	590.834.933.000.00	207.157.097.345.00	115.000.000.00	22.672.771.041.00	74.205.102.079.00	109.360.906.525.00	803.317.700.00	0.00	8.860.000.000
40.220.358.249.32	6.892.279.331.00	22.868.513.902.07	902.037.959.99	9.557.527.062.26	458.239.639.000.00	139.685.851.894.00	1.070.012.500.00	14.949.417.309.00	63.112.315.161.00	59.950.489.424.00	563.617.500.00	0.00	3.966.000.000
48.046.560.260.05	10.702.044.984.50	29.280.114.944.46	897.289.751.41	7.167.110.579.68	550.746.051.000.00	150.960.894.157.60	190.584.851.00	15.090.178.925.00	72.796.561.069.00	62.873.265.811.60	70.303.500.00	0.00	5.681.000.000
40.435.991.178.08	6.965.416.166.00	11.044.332.160.00	1.621.264.775.62	20.804.978.076.46	465.947.589.000.00	114.411.456.448.00	445.655.500.00	15.263.008.376.00	17.947.224.490.00	72.030.756.712.00	8.724.809.370.00	0.00	4.628.000.000
39.860.842.246.42	4.038.997.939.00	24.234.935.748.47	414.056.027.47	11.172.852.531.48	225.699.721.000.00	111.495.557.389.56	422.778.000.00	18.056.996.427.17	42.463.517.393.58	49.005.036.097.49	1.248.442.622.00	298.786.849.72	1.599.000.000

Sumber : Badan Pusat Statistik - DIY 2013

PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Retribusi Daerah	Pendapatan Hasil Pengeluaran Kekayaan Daerah yang Diusabkan	Lain-lain PAD yang sah	Dana Alokasi Umum	BELANJA MODAL	Belanja Tanah	Belanja Peralatan dan Mesin	Belanja Gedung dan Bangunan	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Belanja Aset Tetap Lainnya	Belanja Aset Lainnya	PDRB
198,650,518,839	59,385,578,062	60,254,329,366	52,790,345,015	26,220,266,396	1,086,282,210,000	198,090,778,260	6,368,229,432	31,739,879,774	120,021,680,880	36,242,045,403	2,863,645,780	755,296,991	14,501,059,000
258,671,098,123	116,873,915,640	68,033,758,376	24,248,217,129	49,515,205,978	536,786,256,000	391,290,243,010	5,368,075,960	68,085,118,098	132,801,237,187	183,706,002,165	1,329,809,600	-	37,076,751,000
399,263,956,504	197,020,356,557	119,564,617,840	22,914,533,335	59,764,448,772	1,115,703,641,000	612,386,350,945	30,531,988,260	106,744,983,281	195,420,172,699	273,557,461,605	6,131,745,100	-	15,465,581,000
75,532,291,693	23,114,864,247	9,681,372,754	5,836,517,684	36,799,537,008	712,690,907,000	148,249,417,812	1,065,768,280	32,772,399,660	27,665,337,850	86,328,560,612	417,351,400	-	10,848,470,000
98,442,632,628	15,482,863,348	35,589,585,555	6,271,074,551	41,099,103,074	871,927,247,000	258,510,771,863	2,683,828,982	64,048,639,681	47,775,112,191	126,728,432,659	17,274,698,350	-	7,941,832,000
441,863,068,294	301,781,987,749	86,471,546,547	15,298,096,935	38,311,437,083	912,571,834,000	405,699,482,843	106,606,411,800	63,505,792,472	112,143,616,677	116,305,733,959	7,137,827,935	-	34,240,720,000
48,338,061,521	12,088,798,564	14,311,790,523	13,750,890,325	8,186,582,109	921,384,109,200	185,630,211,095	185,630,211,095	-	-	-	-	-	13,327,326,000
47,087,584,059	9,427,005,382	23,935,158,129	3,222,513,820	10,502,906,728	487,917,464,000	53,346,801,300	979,930,340	18,358,985,176	11,330,610,440	21,631,077,244	330,975,600	715,222,500	3,994,000,000
71,025,304,605	16,180,865,052	32,901,913,698	2,286,562,123	19,655,863,732	738,270,368,000	131,399,494,865	1,349,930,000	35,189,377,875	32,839,686,381	61,395,425,109	625,075,500	-	12,533,000,000
84,713,357,594	18,702,755,659	10,572,452,805	3,128,400,612	52,309,748,538	670,274,785,673	119,766,418,438	1,848,667,900	15,333,021,413	39,029,262,300	58,355,440,000	1,051,710,500	4,148,316,325	8,206,000,000
58,742,305,659	12,765,969,116	35,326,711,417	1,957,480,427	8,692,144,699	642,797,600,000	118,771,773,531	2,996,280,309	16,518,288,351	28,685,392,488	56,563,646,094	14,008,166,289	-	5,855,000,000
76,057,772,876	22,350,589,469	36,812,004,923	6,721,129,719	10,174,045,765	604,521,811,000	97,925,510,590	450,421,465	33,980,577,620	16,320,959,200	36,110,771,105	11,014,381,200	48,400,000	7,151,000,000
112,526,536,706	17,694,377,277	17,156,556,961	4,233,018,283	73,442,584,185	620,576,636,000	68,355,050,657	350,074,500	15,861,518,785	26,209,137,856	25,451,447,216	482,872,300	-	8,387,000,000
69,609,314,290	8,285,157,843	11,574,180,502	2,398,632,077	47,351,343,868	528,061,281,000	62,069,454,716	1,027,111,460	12,570,617,083	13,744,432,860	19,687,211,293	15,040,083,020	-	5,850,000,000
65,699,258,995	13,358,017,629	19,172,685,442	4,123,502,944	29,045,052,980	411,434,996,000	92,130,262,100	3,500,000	12,636,972,700	16,224,730,400	62,777,824,750	487,234,250	-	4,454,000,000
73,062,775,368	14,464,434,976	10,184,459,417	4,316,292,686	44,097,588,289	640,042,082,000	131,061,229,179	1,464,142,295	21,994,597,035	41,413,977,150	51,462,992,699	14,725,520,000	-	7,129,000,000
51,549,747,508	9,206,459,923	7,283,075,519	2,469,461,328	32,590,750,738	238,069,009,000	89,642,823,676	4,597,077,250	14,922,453,788	21,298,693,974	47,708,661,624	407,752,040	708,185,000	1,661,000,000
327,992,258,750	177,680,372,947	80,559,886,995	6,210,426,962	63,541,571,846	640,186,272,000	216,489,091,097	5,334,753,000	78,198,194,258	51,257,034,780	74,630,986,642	6,675,339,060	392,783,357	38,465,000,000
81,637,099,293	16,541,249,955	15,978,422,097	7,424,931,058	41,692,495,183	573,512,337,000	123,249,280,474	-	-	-	-	-	123,249,280,474	9,076,401,000
95,244,807,228	17,540,953,399	12,222,044,607	15,332,247,889	50,149,561,333	606,700,000,000	106,435,063,468	3,817,936,713	24,463,500,450	49,492,756,650	28,315,042,655	345,827,000	-	10,358,000,000
31,596,313,387	7,270,048,616	19,615,315,177	1,302,325,710	3,408,623,884	244,569,563,000	88,017,059,240	-	12,155,152,028	66,483,529,600	9,014,729,022	363,648,590	-	16,034,000,000
79,507,391,611	11,592,119,855	8,740,102,804	2,743,934,042	56,431,234,911	598,046,354,000	75,499,653,606	2,507,865,558	24,486,154,247	15,141,068,096	32,767,508,205	597,057,500	-	9,834,000,000
49,313,077,418	7,224,651,386	32,051,520,343	1,145,277,055	8,891,628,633	475,711,035,000	101,443,788,544	2,633,700,000	15,239,756,965	12,496,178,900	70,800,164,179	279,988,500	-	4,385,000,000
48,664,624,186	11,124,661,305	32,401,943,374	1,005,965,958	4,132,053,549	563,867,637,000	98,140,663,137	172,831,802	7,352,598,979	39,784,684,561	38,416,593,295	12,413,954,500	-	6,432,000,000
53,553,783,140	6,926,392,798	18,320,266,204	1,843,529,835	26,463,594,303	472,359,819,000	89,494,803,780	39,480,009	24,383,566,965	16,185,466,731	48,695,142,575	191,147,500	-	5,197,000,000
47,690,974,774	4,858,472,679	6,649,853,795	466,678,300	35,715,970,000	223,564,245,000	91,736,072,131	427,927,500	13,230,688,302	39,284,980,687	35,549,992,500	3,075,569,642	166,913,500	1,800,000,000

Sumber : Badan Pusat Statistik - DIY 2013

PAD	Pajak daerah	Retribusi daerah	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	Dana alokasi umum	Belanja Modal	PDRB
215,448,347,314	97,746,157,850	26,158,989,464	44,000,000,000	47,543,200,000	1,203,323,247,000	277,432,358,235	15,852,245,000
345,761,858,509	221,706,780,000	67,895,632,509	28,848,000,000	27,311,446,000	680,732,734,000	529,345,147,409	39,876,027,000
519,565,487,000	313,339,457,000	97,615,297,000	24,364,513,000	84,246,220,000	1,326,864,692,000	824,227,246,000	17,093,267,000
83,264,827,165	26,597,876,465	8,119,850,700	12,567,100,000	35,980,000,000	746,157,310,000	212,222,838,558	11,479,006,000
125,879,976,500	45,425,000,000	37,592,700,000	5,590,000,000	37,272,276,500	972,025,825,000	211,592,288,426	8,458,702,000
609,122,472,971	490,773,392,621	64,273,222,182	8,837,000,000	45,238,858,168	1,005,982,541,000	743,233,471,516	39,219,772,000
90,605,605,000	16,929,385,000	9,493,723,000	4,242,553,000	59,939,944,000	476,326,683,000	57,864,985,000	14,337,807,000
58,400,000,000	10,091,960,000	7,774,343,000	5,823,500,000	34,710,197,000	547,437,970,000	204,602,263,450	4,472,000,000
86,210,000,000	17,110,000,000	23,432,986,000	2,300,000,000	43,367,014,000	800,671,665,000	234,397,107,000	14,630,000,000
97,874,429,000	23,299,337,000	16,129,690,000	3,282,641,000	55,162,761,000	592,496,116,000	191,515,456,000	9,118,000,000
68,320,517,000	14,234,000,000	16,804,450,000	2,557,207,000	34,724,860,000	732,339,067,000	145,573,737,000	6,484,000,000
88,180,506,309	28,183,357,000	39,939,276,000	7,863,586,309	12,194,287,000	669,259,369,000	155,334,854,253	8,022,000,000
107,985,691,000	19,924,249,000	20,840,852,000	4,233,018,000	62,987,572,000	692,522,880,000	128,347,164,000	9,386,000,000
67,353,773,327	9,229,740,000	12,804,588,377	2,486,697,000	42,832,747,950	586,119,442,000	105,264,669,607	6,467,000,000
80,130,640,000	13,305,000,000	23,144,143,000	3,523,383,000	40,158,114,000	468,987,872,000	157,302,286,950	4,970,000,000
83,974,505,000	22,853,771,000	12,280,785,000	4,405,341,000	44,434,608,000	704,172,500,000	175,031,590,528	7,936,000,000
62,498,990,000	15,750,000,000	6,409,617,000	2,167,517,000	38,171,856,000	262,810,281,000	86,935,202,176	1,849,000,000
427,311,654,923	275,562,250,000	84,253,796,954	6,005,800,505	61,489,807,464	715,959,967,000	338,248,711,749	43,398,000,000
106,885,124,343	28,752,000,000	21,452,299,343	7,546,000,000	49,134,825,000	625,350,000,000	90,931,987,902	10,097,345,000
103,335,720,800	20,350,000,000	12,387,622,500	17,035,000,000	53,563,098,300	680,161,850,000	185,056,077,975	11,774,000,000
78,827,888,375	39,479,762,215	33,067,062,160	2,937,212,000	3,343,852,000	598,971,886,000	177,016,135,216	18,254,000,000
84,520,965,295	12,523,139,600	8,348,636,895	2,607,093,000	61,042,095,800	669,916,556,000	158,177,667,346	11,002,000,000
45,687,208,081	7,413,228,845	29,594,980,850	1,145,277,055	7,533,721,331	513,549,051,000	242,467,421,600	4,917,000,000
52,711,776,999	11,452,000,000	35,338,147,000	1,020,800,000	4,900,829,999	634,712,282,000	149,162,890,056	7,450,000,000
61,066,268,000	7,508,300,000	20,129,780,000	2,578,891,000	30,849,297,000	535,503,337,000	98,418,936,406	5,870,000,000
49,117,779,873	4,988,979,425	7,006,821,268	466,678,300	36,655,300,880	250,235,761,000	86,731,998,268	2,031,000,000

Sumber : Badan Pusat Statistik - DIY 2013

PAD	Pajak daerah	Retribusi daerah	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	Dana alokasi umum	Belanja Modal	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, irigasi dan jaringan	Aset tetap lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset lainnya	PDRB
366.317.000.000	186.142.000.000	41.045.068.255	45.168.813.789	93.950.950.086	1.518.230.000.000	489.588.000.000	13.053.680.138	96.774.173.316	330.764.000.000	46.085.415.700	2.878.916.413	-	32.000.000	16.329.203.000
801.853.000.000	599.342.000.000	127.375.000.000	38.502.241.331	96.633.466.146	962.995.000.000	970.051.000.000	18.201.310.250	139.176.000.000	192.169.000.000	613.633.000.000	6.872.733.394	-	-	41.029.384.000
1.048.230.000.000	741.235.000.000	127.813.000.000	11.814.896.156	167.368.000.000	1.672.610.000.000	1.035.470.000.000	39.209.470.950	203.801.000.000	416.705.000.000	264.435.000.000	111.318.000.000	-	-	18.928.345.000
120.372.000.000	40.205.227.196	18.631.995.669	10.686.411.569	51.448.400.289	917.182.000.000	230.142.000.000	1.722.458.370	45.297.554.844	70.989.409.983	109.093.000.000	3.039.568.350	-	-	12.039.485.000
185.191.000.000	81.838.360.083	23.825.704.183	6.178.682.108	73.347.799.614	1.193.640.000.000	268.721.000.000	746.131.950	101.817.000.000	74.790.261.342	81.847.538.600	9.520.186.985	-	-	9.209.123.000
1.005.580.000.000	820.564.000.000	78.649.880.372	7.227.067.446	99.142.825.500	1.323.680.000.000	806.665.000.000	212.334.000.000	100.489.000.000	350.658.000.000	137.810.000.000	5.375.048.062	-	-	43.938.475.000
153.009.000.000	44.417.025.271	14.212.668.374	3.664.327.800	90.715.388.690	582.124.000.000	126.531.000.000	1.388.232.015	58.069.799.097	30.491.772.120	18.751.812.900	17.829.746.029	-	-	15.394.827.000
81.987.007.133	11.486.783.665	8.817.557.815	5.758.248.478	55.924.417.175	673.181.000.000	219.108.000.000	424.520.000	37.657.802.484	79.777.770.640	81.456.793.250	19.414.698.695	-	376.109.500	4.869.000.000
101.807.000.000	24.104.116.911	16.591.924.042	3.209.343.841	57.901.473.211	981.051.000.000	192.983.000.000	234.500.000	32.910.651.895	54.853.955.253	90.622.913.169	14.351.328.700	-	-	16.427.000.000
129.077.000.000	28.434.798.831	13.600.889.981	4.640.566.066	82.400.315.211	712.740.000.000	297.197.000.000	4.091.625.250	49.572.440.912	115.040.000.000	122.266.000.000	5.685.529.500	-	539.411.000	10.120.000.000
102.374.000.000	20.375.075.302	24.787.134.714	6.822.776.847	50.389.383.697	906.222.000.000	295.209.000.000	17.579.651.597	33.202.830.208	165.279.000.000	71.987.960.115	7.159.556.568	-	-	7.208.000.000
123.723.000.000	42.915.498.908	25.022.657.143	9.060.433.218	46.724.192.080	816.733.000.000	95.350.817.769	8.439.409.980	18.691.324.693	23.709.837.096	44.197.202.600	313.043.400	-	-	8.771.000.000
163.734.000.000	25.002.619.458	29.379.827.175	5.692.745.236	103.658.000.000	850.377.000.000	174.150.000.000	794.355.000	34.998.526.595	91.527.597.974	43.325.480.457	3.504.165.750	-	-	10.456.000.000
98.262.003.374	12.114.227.262	14.620.639.262	3.120.004.597	69.407.132.153	711.742.000.000	149.105.000.000	627.801.500	25.976.340.853	70.872.004.121	49.954.464.766	1.674.308.401	-	-	7.143.000.000
103.305.000.000	21.691.251.109	26.290.263.055	3.318.450.860	52.004.549.957	570.455.000.000	200.204.000.000	842.000	37.379.820.430	107.715.000.000	49.046.985.390	6.060.675.080	-	-	5.440.000.000
118.742.000.000	25.223.739.265	17.145.743.673	9.462.611.250	66.909.525.869	860.568.000.000	303.315.000.000	3.019.144.947	57.347.572.570	102.730.000.000	138.472.000.000	1.746.130.340	-	-	8.798.000.000
77.798.870.961	18.695.207.840	10.185.796.292	3.386.255.566	45.531.611.273	325.710.000.000	124.905.000.000	2.081.264.867	30.091.349.533	29.364.900.491	62.941.248.166	377.767.050	-	48.750.000	2.032.000.000
779.617.000.000	597.520.000.000	84.877.260.948	6.777.319.253	90.442.433.144	936.866.000.000	351.854.000.000	8.885.267.800	45.941.701.234	71.524.174.821	219.802.000.000	4.700.947.210	-	-	48.461.000.000
166.598.000.000	51.768.352.232	20.595.098.751	8.184.263.102	86.050.063.944	769.035.000.000	140.107.000.000	1.723.046.790	30.384.563.920	36.129.061.430	63.581.718.620	8.288.362.050	-	-	11.242.151.000
129.285.000.000	27.916.743.414	14.415.005.881	19.399.749.695	67.553.234.147	832.016.000.000	271.049.000.000	5.508.395.900	63.406.732.525	79.856.647.125	110.710.000.000	11.566.584.435	-	-	13.461.000.000
164.774.000.000	74.972.432.195	32.945.591.331	3.950.657.474	53.505.065.879	733.782.000.000	238.323.000.000	5.306.350.390	42.982.671.930	46.721.989.255	141.006.000.000	2.306.463.000	-	-	20.766.000.000
125.173.000.000	17.129.110.068	16.484.188.497	4.180.046.169	87.380.052.512	822.299.000.000	184.104.000.000	1.700.498.800	25.666.249.278	82.515.804.725	70.156.694.903	4.094.627.950	-	-	12.305.000.000
84.377.021.981	11.630.845.325	16.467.708.278	2.190.408.788	54.088.059.590	625.873.000.000	199.461.000.000	5.362.920.400	29.159.406.578	84.604.353.270	75.774.001.502	4.559.902.575	-	-	5.615.000.000
108.766.000.000	20.514.781.469	17.941.781.871	1.289.510.329	69.120.333.146	779.078.000.000	193.381.000.000	223.990.000	55.527.801.859	68.063.184.861	69.517.837.376	49.251.400	-	-	8.405.000.000
70.197.613.639	9.348.830.314	22.819.459.240	2.204.629.325	95.824.694.760	654.343.000.000	134.758.000.000	422.595.100	31.322.233.306	36.044.772.180	55.398.004.266	491.054.434	-	11.079.721.780	6.646.000.000
63.640.945.339	11.156.119.479	6.918.701.402	949.883.434	44.616.241.024	315.773.000.000	90.965.622.933	8.173.607.153	17.484.739.678	27.326.095.245	17.433.311.012	419.138.450	-	20.126.731.395	2.273.000.000

Sumber : Badan Pusat Statistik - DIY 2013

LAMPIRAN II; REKAPITULASI HASIL DATA PENELITIAN

No.	Tahun	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Dana Alokasi Umum	BELANJA MODAL	PDRB
1	2008	144,660,409,277.08	1,001,542,069,000.00	180,435,877,408.00	12,618,513,000
2		249,063,806,936.00	525,365,565,000.00	148,105,756,479.00	34,375,562,000
3		307,634,448,365.00	1,062,589,558,000.00	366,061,050,666.00	12,959,070,000
4		64,034,543,366.00	618,600,128,000.00	198,796,145,614.00	9,397,832,000
5		87,402,424,551.00	827,153,450,000.00	149,046,526,061.00	7,038,468,000
6		314,627,155,412.00	965,518,566,800.00	345,160,822,373.00	25,749,394,000
7		63,849,140,718.00	410,130,631,400.00	109,889,061,015.50	11,473,915,000
8		48,954,140,914.00	478,260,120,000.00	141,456,779,115.00	3,415,000,000
9		72,073,945,369.00	716,426,703,000.00	195,181,836,521.00	9,551,000,000
10		71,267,901,105.00	505,641,495,000.00	156,369,600,914.00	6,469,000,000
11		58,599,425,037.00	616,395,049,000.00	160,041,447,457.00	4,569,000,000
12		78,119,511,336.00	588,001,786,000.00	121,809,609,633.00	5,859,000,000
13		80,495,293,572.01	603,264,393,000.00	162,415,381,557.00	6,718,000,000
14		51,174,860,039.00	515,796,414,000.00	106,615,079,531.00	4,661,000,000
15		51,125,558,424.00	398,410,703,000.00	123,254,536,770.00	3,606,000,000
16		59,154,639,032.00	606,452,130,000.00	191,884,274,027.00	5,536,000,000
17		45,147,465,983.00	225,384,715,000.00	126,481,274,235.00	1,370,000,000
18		267,914,250,403.00	634,864,459,000.00	155,065,660,985.00	30,516,000,000
19		69,800,761,508.85	583,169,351,000.00	302,760,366,899.00	7,417,980,000
20		66,608,873,942.51	599,292,383,000.00	191,930,727,365.00	7,985,000,000
21		55,790,363,612.51	501,520,436,000.00	204,842,512,477.00	12,514,000,000
22		60,307,577,351.84	580,060,073,000.00	163,926,064,222.00	7,649,000,000
23		36,957,799,237.87	447,934,892,000.00	134,092,847,414.00	3,475,000,000
24		41,850,665,707.64	538,559,997,000.00	178,118,933,515.70	4,929,000,000
25		35,187,914,905.19	465,748,300,000.00	151,951,693,871.00	3,988,000,000
26		40,794,908,395.66	217,165,721,000.00	104,997,742,005.30	1,381,000,000

Sumber : BPS - DIY 2013

27	2009	153,271,649,974.00	1,080,215,507,000.00	148,925,370,067.00	13,272,600,000
28		287,299,507,395.00	618,237,958,000.00	664,800,165,380.00	35,541,940,000
29		337,903,884,329.00	1,111,979,562,000.00	510,324,974,669.00	14,232,423,000
30		67,665,304,446.00	666,926,184,000.00	168,592,432,835.00	10,158,571,000
31		80,616,078,322.80	855,787,030,000.00	148,639,730,574.80	7,448,192,000
32		360,152,627,690.00	989,233,620,000.00	390,988,308,073.00	29,625,574,000
33		76,503,523,370.19	431,419,690,000.00	118,847,625,132.50	12,339,625,000
34		49,696,650,709.00	487,316,394,000.00	69,902,568,615.00	3,637,000,000
35		80,275,021,213.00	716,589,942,000.00	130,717,311,894.00	11,134,000,000
36		71,919,859,343.00	522,061,147,000.00	90,748,385,252.00	7,456,000,000
37		63,016,363,174.00	638,804,310,000.00	159,361,410,093.00	5,306,000,000
38		75,582,195,900.00	596,437,825,000.00	108,098,066,518.00	6,588,000,000
39		90,667,623,138.54	621,169,150,000.00	161,129,015,196.00	7,705,000,000
40		60,814,316,979.00	526,622,715,000.00	110,019,923,725.00	5,328,000,000
41		56,887,895,318.00	407,158,671,000.00	56,894,049,901.00	4,064,000,000
42		70,859,594,636.00	624,981,282,000.00	142,098,559,409.00	6,407,000,000
43		53,055,833,309.00	236,691,342,000.00	150,495,407,426.00	1,542,000,000
44		306,112,422,821.00	707,635,157,000.00	216,893,611,808.00	34,541,000,000
45		88,691,362,690.38	568,502,143,000.00	107,353,190,571.00	8,147,860,000
46		71,452,396,308.29	581,718,829,000.00	206,287,004,700.00	9,124,000,000
47		59,633,358,366.84	502,176,671,000.00	139,741,392,302.00	14,453,000,000
48		72,274,642,864.63	590,834,933,000.00	207,157,097,345.00	8,860,000,000
49		40,220,358,249.32	458,239,639,000.00	139,685,851,894.00	3,966,000,000
50		48,046,560,260.05	550,746,051,000.00	150,960,894,157.60	5,681,000,000
51		40,435,991,178.08	465,947,589,000.00	114,411,456,448.00	4,628,000,000
52		39,860,842,246.42	225,699,721,000.00	111,495,557,389.96	1,599,000,000

Sumber : BPS - DIY 2013

53	2010	198,650,518,839	1,086,282,210,000	198,090,778,260	14,501,059,000
54		258,671,098,123	536,786,256,000	391,290,243,010	37,076,751,000
55		399,263,956,504	1,115,703,641,000	612,386,350,945	15,465,581,000
56		75,532,291,693	712,690,907,000	148,249,417,812	10,848,470,000
57		98,442,632,628	871,927,247,000	258,510,711,863	7,941,832,000
58		441,863,068,294	912,571,834,000	405,699,482,843	34,240,720,000
59		48,338,061,521	921,384,109,200	185,630,211,095	13,327,326,000
60		47,087,584,059	487,917,464,000	53,346,801,300	3,994,000,000
61		71,025,304,605	738,270,368,000	131,399,494,865	12,533,000,000
62		84,713,357,594	670,274,785,673	119,766,418,438	8,206,000,000
63		58,742,305,659	642,797,600,000	118,771,773,531	5,855,000,000
64		76,057,772,876	604,521,811,000	97,925,510,590	7,151,000,000
65		112,526,536,706	620,576,636,000	68,355,050,657	8,387,000,000
66		69,609,314,290	528,061,281,000	62,069,454,716	5,850,000,000
67		65,699,258,995	411,434,996,000	92,130,262,100	4,454,000,000
68		73,062,775,368	640,042,082,000	131,061,229,179	7,129,000,000
69		51,549,747,508	238,069,009,000	89,642,823,676	1,661,000,000
70		327,992,258,750	640,186,272,000	216,489,091,097	38,465,000,000
71		81,637,099,293	573,512,337,000	123,249,280,474	9,076,401,000
72		95,244,807,228	606,700,000,000	106,435,063,468	10,358,000,000
73		31,596,313,387	244,969,563,000	88,017,059,240	16,034,000,000
74		79,507,391,611	598,046,354,000	75,499,653,606	9,834,000,000
75		49,313,077,418	475,711,035,000	101,443,788,544	4,385,000,000
76		48,664,624,186	563,867,637,000	98,140,663,137	6,432,000,000
77		53,553,783,140	472,359,819,000	89,494,803,780	5,197,000,000
78		47,690,974,774	223,964,245,000	91,736,072,131	1,800,000,000

Sumber : BPS - DIY 2013

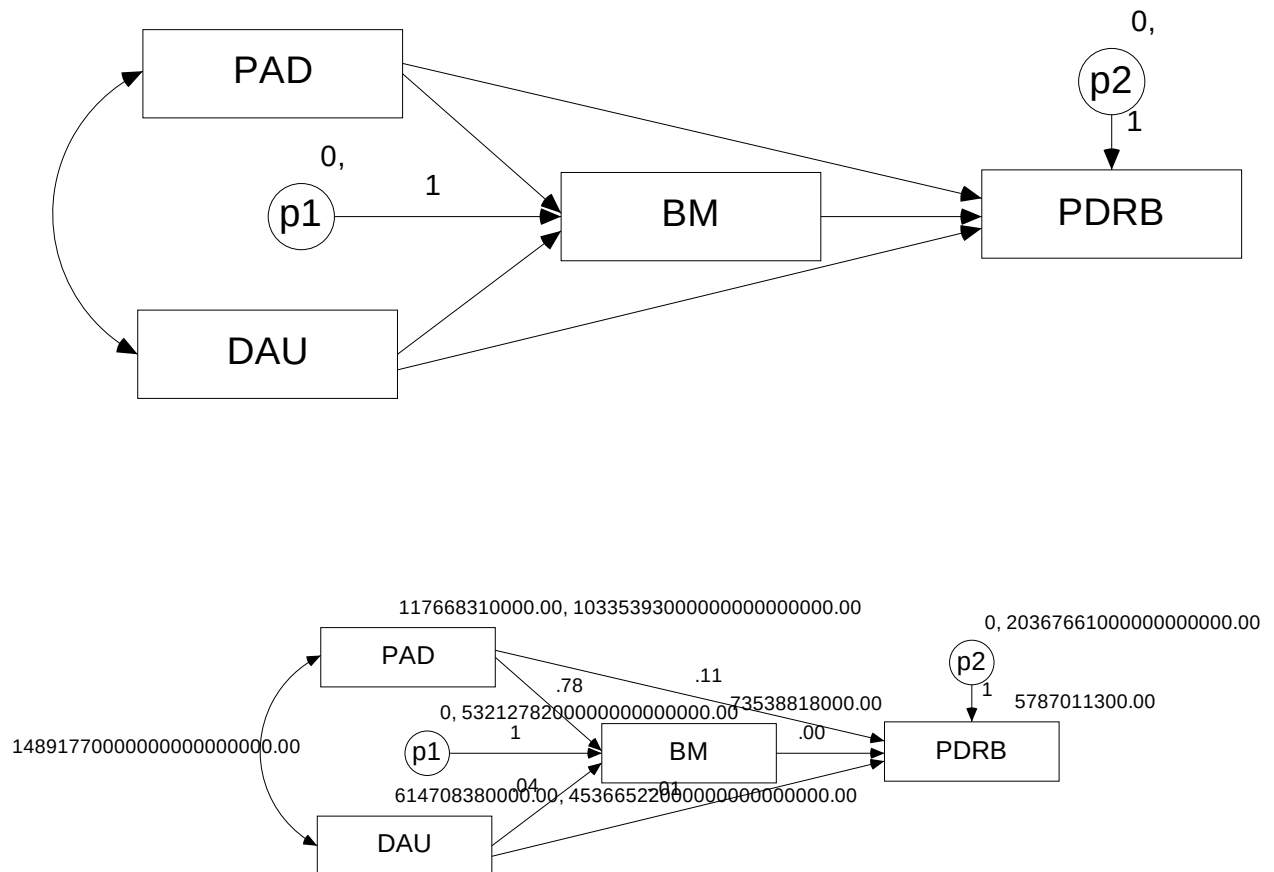
79	2011	215,448,347,314	1,203,323,247,000	277,432,358,235	15,852,245,000
80		345,761,858,509	680,732,734,000	529,345,147,409	39,876,027,000
81		519,565,487,000	1,326,864,692,000	824,227,246,000	17,093,267,000
82		83,264,827,165	746,157,310,000	212,222,838,558	11,479,006,000
83		125,879,976,500	972,025,825,000	211,592,288,426	8,458,702,000
84		609,122,472,971	1,005,982,541,000	743,233,471,516	39,219,772,000
85		90,605,605,000	476,326,683,000	57,864,985,000	14,337,807,000
86		58,400,000,000	547,437,970,000	204,602,263,450	4,472,000,000
87		86,210,000,000	800,671,665,000	234,397,107,000	14,630,000,000
88		97,874,429,000	592,496,116,000	191,515,456,000	9,118,000,000
89		68,320,517,000	732,339,067,000	145,573,737,000	6,484,000,000
90		88,180,506,309	669,259,369,000	155,334,854,253	8,022,000,000
91		107,985,691,000	692,522,880,000	128,347,164,000	9,386,000,000
92		67,353,773,327	586,119,442,000	105,264,669,607	6,467,000,000
93		80,130,640,000	468,987,872,000	157,302,286,950	4,970,000,000
94		83,974,505,000	704,172,500,000	175,031,590,528	7,936,000,000
95		62,498,990,000	262,810,281,000	86,935,202,176	1,849,000,000
96		427,311,654,923	715,959,967,000	338,248,711,749	43,398,000,000
97		106,885,124,343	625,350,000,000	90,931,987,902	10,097,345,000
98		103,335,720,800	680,161,850,000	185,056,077,975	11,774,000,000
99		78,827,888,375	598,971,886,000	177,016,135,216	18,254,000,000
100		84,520,965,295	669,916,556,000	158,177,667,346	11,002,000,000
101		45,687,208,081	513,549,051,000	242,467,421,600	4,917,000,000
102		52,711,776,999	634,712,282,000	149,162,890,056	7,450,000,000
103		61,066,268,000	535,503,337,000	98,418,936,406	5,870,000,000
104		49,117,779,873	250,235,761,000	86,731,998,268	2,031,000,000

Sumber : BPS - DIY 2013

105	2012	366,317,000,000	1,518,230,000,000	489,588,000,000	16,329,203,000
106		801,853,000,000	962,996,000,000	970,051,000,000	41,029,384,000
107		1,048,230,000,000	1,672,610,000,000	1,035,470,000,000	18,928,345,000
108		120,972,000,000	917,182,000,000	230,142,000,000	12,039,485,000
109		185,191,000,000	1,193,640,000,000	268,721,000,000	9,209,123,000
110		1,005,580,000,000	1,323,680,000,000	806,665,000,000	43,938,475,000
111		153,009,000,000	582,124,000,000	126,531,000,000	15,394,827,000
112		81,987,007,133	673,181,000,000	219,108,000,000	4,869,000,000
113		101,807,000,000	981,051,000,000	192,983,000,000	16,427,000,000
114		129,077,000,000	712,740,000,000	297,197,000,000	10,120,000,000
115		102,374,000,000	906,222,000,000	295,209,000,000	7,208,000,000
116		123,723,000,000	816,733,000,000	95,350,817,769	8,771,000,000
117		163,734,000,000	850,377,000,000	174,150,000,000	10,456,000,000
118		98,262,003,374	711,742,000,000	149,105,000,000	7,143,000,000
119		103,305,000,000	570,455,000,000	200,204,000,000	5,440,000,000
120		118,742,000,000	860,568,000,000	303,315,000,000	8,798,000,000
121		77,798,870,961	325,710,000,000	124,905,000,000	2,032,000,000
122		779,617,000,000	936,866,000,000	351,854,000,000	48,461,000,000
123		166,598,000,000	768,035,000,000	140,107,000,000	11,242,151,000
124		129,285,000,000	832,016,000,000	271,049,000,000	13,461,000,000
125		164,774,000,000	733,782,000,000	238,323,000,000	20,766,000,000
126		125,173,000,000	827,299,000,000	184,104,000,000	12,305,000,000
127		84,377,021,981	625,873,000,000	199,461,000,000	5,615,000,000
128		108,766,000,000	779,078,000,000	193,382,000,000	8,405,000,000
129		70,197,613,639	654,343,000,000	134,758,000,000	6,646,000,000
130		63,640,945,339	315,773,000,000	90,963,622,933	2,273,000,000

Sumber : BPS - DIY 2013

LAMPIRAN III HASIL OLAH DATA



Analysis Summary

Notes for Group (Group number 1)

The model is recursive.

Sample size = 130

Variable Summary (Group number 1)

Your model contains the following variables (Group number 1)

Observed, endogenous variables

BM

PDRB

Observed, exogenous variables

PAD

DAU

Unobserved, exogenous variables

p1

p2

Variable counts (Group number 1)

Number of variables in your model: 6

Number of observed variables: 4

Number of unobserved variables: 2

Number of exogenous variables: 4

Number of endogenous variables: 2

Parameter summary (Group number 1)

	Weights	Covariances	Variances	Means	Intercepts	Total
Fixed	2	0	0	0	0	2
Labeled	0	0	0	0	0	0
Unlabeled	5	1	4	2	2	14
Total	7	1	4	2	2	16

Assessment of normality (Group number 1)

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
PAD	2.000	4.000	.154	.627	-.464	-.947
DAU	1.625	3.875	-.276	-1.147	.202	.413
BM	1.750	4.000	-.194	-.791	-.168	-.344
PDRB	1.571	4.000	-.148	-.606	-.350	-.714
Multivariate					-1.179	-.602

Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1)

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
19	16.757	.005	.259
112	11.997	.017	.884
2	10.986	.027	.924
23	10.932	.027	.833
29	10.753	.029	.751
9	10.261	.036	.783
91	10.107	.039	.715
109	10.069	.039	.595
126	10.030	.040	.473
108	8.963	.062	.852
110	8.875	.064	.807
20	8.744	.068	.780
1	8.270	.082	.895
28	8.183	.085	.871
101	8.072	.089	.855
130	8.042	.090	.804
68	7.990	.092	.756
75	7.874	.096	.746
102	7.804	.099	.709
129	7.687	.104	.706
11	7.680	.104	.627
107	7.642	.106	.568
104	7.609	.107	.504
119	7.561	.109	.455
99	7.225	.124	.644
113	7.085	.131	.678

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
6	7.050	.133	.630
120	7.021	.135	.576
111	6.930	.140	.578
3	6.885	.142	.540
90	6.877	.143	.468
125	6.864	.143	.404
64	6.819	.146	.370
80	6.775	.148	.337
69	6.756	.149	.287
81	6.637	.156	.322
18	6.618	.158	.274
41	6.407	.171	.398
118	6.244	.182	.493
30	6.244	.182	.423
5	6.221	.183	.378
45	6.134	.189	.400
16	6.111	.191	.357
128	6.045	.196	.359
116	5.983	.200	.359
115	5.965	.202	.316
122	5.931	.204	.290
24	5.887	.208	.275
76	5.860	.210	.246
10	5.802	.214	.247
62	5.743	.219	.248
25	5.731	.220	.210
37	5.731	.220	.167

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
27	5.676	.225	.167
15	5.505	.239	.269
86	5.454	.244	.268
66	5.422	.247	.249
50	5.410	.248	.213
121	5.382	.250	.194
106	5.357	.253	.173
123	5.302	.258	.178
92	5.289	.259	.150
22	5.234	.264	.155
78	5.174	.270	.165
26	5.137	.274	.158
94	5.126	.275	.132
65	5.110	.276	.112
73	5.080	.279	.102
98	5.025	.285	.109
38	4.999	.287	.098
8	4.974	.290	.087
34	4.936	.294	.084
103	4.902	.298	.080
56	4.823	.306	.100
97	4.819	.306	.079
55	4.663	.324	.156
40	4.635	.327	.146
36	4.591	.332	.149
114	4.421	.352	.287
117	4.406	.354	.258

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
32	4.322	.364	.317
13	4.307	.366	.287
17	4.223	.377	.352
33	4.166	.384	.383
46	4.157	.385	.343
39	4.122	.390	.341
74	4.081	.395	.350
35	4.057	.398	.333
4	4.035	.401	.314
12	4.016	.404	.293
82	3.936	.415	.359
63	3.929	.416	.319
21	3.840	.428	.402
95	3.802	.433	.411
124	3.802	.433	.358
14	3.689	.450	.490
93	3.636	.458	.527
51	3.568	.468	.589
7	3.484	.480	.675
127	3.444	.486	.691

Sample Moments (Group number 1)

Sample Covariances (Group number 1)

	PAD	DAU	BM	PDRB
PAD	.242			
DAU	.038	.243		
BM	.066	.080	.195	
PDRB	.070	.167	.098	.288

Condition number = 3.991

Eigenvalues

.881 .226 .160 .131

Determinant of sample covariance matrix = 1.398

Sample Correlations (Group number 1)

	PAD	DAU	BM	PDRB
PAD	1.000			
DAU	.155	1.000		
BM	.306	.367	1.000	
PDRB	.265	.631	.413	1.000

Condition number = 4.144

Eigenvalues

3.009 .961 .821 .625

Notes for Model (Default model)

Computation of degrees of freedom (Default model)

Number of distinct sample moments: 11

Number of distinct parameters to be estimated: 7

Degrees of freedom (11 - 7): 4

Result (Default model)

Minimum was achieved

Chi-square = 5.580

Degrees of freedom = 6

Probability level = .479

Estimates (Group number 1 - Default model)

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)

Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- PAD	.777	.138	5.646	***	par_1
BM <--- DAU	.442	.066	3.645	.019	par_2
PDRB <--- PAD	.106	.010	10.248	***	par_3

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PDRB <--- DAU	.009	.004	2.262	.024	par_4
PDRB <--- BM	.005	.009	.559	.576	par_5

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate
BM <--- PAD	.703
BM <--- DAU	.080
PDRB <--- PAD	1.057
PDRB <--- DAU	-.192
PDRB <--- BM	-.053

Means: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PAD	117668307203.400	10306318963.270	11.417	***	par_7
DAU	614708381836.386	27289171694.121	22.526	***	par_8

Intercepts: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM	73538817821.638	33104276346.186	2.221	.026	par_9
PDRB	5787011296.077	2125768046.804	2.722	.006	par_10

Covariances: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PA <-- DA	148917697590255000000000	3347871992663610000000	4.448	**	par_6
D > U	.000	.000		*	

Correlations: (Group number 1 - Default model)

	Estimate
PAD <--> DAU	.688

Variances: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PAD	10335393326670900000000.000	1618025043251720000000.000	6.388	***	par_11
DAU	45366522104315900000000.000	8755612352011980000000.000	5.181	***	par_12
p1	5321278206164240000000.000	1047625182715890000000.000	5.079	***	par_13
p2	20367661444602000000.000	3963560225904420000.000	5.139	***	par_14

Matrices (Group number 1 - Default model)

Implied (for all variables) Covariances (Group number 1 - Default model)

	DAU	PAD	BM	PDRB
DA	453665221043159			
U	00000000.000			
PA	148917697590255	103353933266709		
D	00000000.000	00000000.000		
BM	134856297773838	865675149065602	126149066196684	
	00000000.000	00000000.000	00000000.000	
PD	109730742100956	917731984991450	733531592988537	10409855529149
RB	00000000.000	000000.000	000000.000	7000000.000

Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model)

	DAU	PAD	BM	PDRB
DAU	1.000			
PAD	.688	1.000		
BM	.564	.758	1.000	
PDRB	.505	.885	.640	1.000

Implied (for all variables) Means (Group number 1 - Default model)

	DAU	PAD	BM	PDRB
	614708381836.386	117668307203.400	190947814460.874	11692014023.080

Implied Covariances (Group number 1 - Default model)

	DAU	PAD	BM	PDRB
DA	453665221043159			
U	00000000.000			
PA	148917697590255	103353933266709		
D	00000000.000	00000000.000		
BM	134856297773838	865675149065602	126149066196684	
	00000000.000	00000000.000	00000000.000	
PD	109730742100956	917731984991450	733531592988537	10409855529149
RB	00000000.000	00000000.000	00000000.000	70000000.000

Implied Correlations (Group number 1 - Default model)

	DAU	PAD	BM	PDRB
DAU	1.000			
PAD	.688	1.000		
BM	.564	.758	1.000	
PDRB	.505	.885	.640	1.000

Implied Means (Group number 1 - Default model)

	DAU	PAD	BM	PDRB
	614708381836.386	117668307203.400	190947814460.874	11692014023.080

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model)
Total Effects (Group number 1 - Default model)

	DAU	PAD	BM
BM	.042	.777	.000
PDRB	.005	.591	-.005

Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model)

	DAU	PAD	BM
BM	.080	.703	.000
PDRB	.022	2.432	-.053

Direct Effects (Group number 1 - Default model)

	DAU	PAD	BM
BM	.042	.777	.000
PDRB	-.009	.106	-.005

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)

	DAU	PAD	BM
BM	.080	.703	.000
PDRB	-.192	1.057	-.053

Indirect Effects (Group number 1 - Default model)

	DAU	PAD	BM
BM	.000	.000	.000
PDRB	.014	.485	.000

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)

	DAU	PAD	BM
BM	.000	.000	.000
PDRB	.214	1.375	.000

Minimization History (Default model)

Iteration	Negative eigenvalues	Condition #	Smallest eigenvalue	Diameter	F	NTries	Ratio
0	e	3	-.234	9999.000	167.492	0	9999.000
1	e	1	-.119	.696	82.229	19	.735
2	e	1	-.050	.580	39.022	5	.747
3	e	0	335.987	.462	10.756	5	.936
4	e	0	395.961	.404	1.419	2	.000
5	e	0	576.050	.217	.050	1	1.099
6	e	0	657.676	.062	.000	1	1.039
7	e	0	657.637	.005	.000	1	1.003
8	e	0	657.592	.000	.000	1	1.000

Pairwise Parameter Comparisons (Default model)

Variance-covariance Matrix of Estimates (Default model)

	pa r_ 1	pa r_ 2	pa r_ 3	pa r_ 4	par_ 5	pa r_ 6	pa r_ 7	pa r_ 8	par _9	par _10	par_ 11	par_ 12	par_ 13	par_ 14
p a r _1	.0 19													
p a r _2	- .0 06	.0 04												
p a r _3	.0 00	.0 00	.0 00											
p a r _4	.0 00	.0 00	.0 00	.0 0 0										
p a r _5	56	-	-	4	1120									
p a r _6	66	52	46	0	8246									
p a r _7	49	09	69	5	8792									
p a r _8	29	92	96	2	6140									
p a r _9	44	82	94	6	0000									
p a r _10	06	20	67	6	0000									
p a r _11	53	30	97	4	0000									
p a r _12	00	95	40	9	0000									

	pa r_ 1	pa r_ 2	pa r_ 3	pa r_ 4	par_ 5	pa r_ 6	pa r_ 7	pa r_ 8	par _9	par _10	par_ 11	par_ 12	par_ 13	par_ 14
p a r _6	00	10	40	5	0000									
	0.	00	00	9	0000									
	00	.0	0.	1	0000									
	0	00	00	6	.000									
			0	0										
				3										
				0										
				0										
				0										
				0.										
				0										
				0										
				0										
					2119									
p a r _7					0064									
	.0	.0	.0	.0	1916	.0								
	00	00	00	0	4110	0								
				0	00.0	0								
					00									
							10							
							62							
					-		20							
					1477		21							
	.0	.0	.0	.0	3588	.0	05							
	00	00	00	0	3862	0	72							
				0	6300	0	65							
					0.00		80							
					0		00							
							00							
							0.							

	pa r_ 1	pa r_ 2	pa r_ 3	pa r_ 4	par_ 5	pa r_ 6	pa r_ 7	pa r_ 8	par _9	par _10	par_ 11	par_ 12	par_ 13	par_ 14
p a r _8							00							
							0							
							17	74						
							61	46						
							13	98						
							52	89						
					-		67	17						
				.0	5912	.0	59	51						
	.0	.0	.0	0	5898	0	19	18						
	00	00	00	0	0304	0	20	80						
					5600		00	00						
					.000		00	00						
							0.	0.						
							00	00						
							0	0						
p a r _9							26	31						
					-		25	39						
	15	-		6	3465	3	99	82	109					
	93	19	-	4	0797	3	23	83	589					
	33	20	74	5	7929	7	73	65	311					
	67	13	35	2	1580	3	37	95	240					
	87	99	27	4.	0000	7.	51	34	465					
	.1	26	.0	3	0000	6	30	20	000					
	34	.9	46	1	0000	6	00	00	000					
		08		9	00.0	3	0.	0.	0.0					
					00		00	00	00					
							0	0						
	-	62	10	-	2599	-	-	-	996	451				
	67	22	88	7	2472	5	20	24	636	888				
	67	2.	90	1	5614	4	87	96	908	978				

	pa r_ 1	pa r_ 2	pa r_ 3	pa r_ 4	par_ 5	pa r_ 6	pa r_ 7	pa r_ 8	par _9	par _10	par_ 11	par_ 12	par_ 13	par_ 14
—	54	69	62	6	2290	8	92	46	031	881				
1	.9	6	.7	6	0000	0	01	98	956	364				
0	45		51	5	0000	2	32	77	00.	000				
				8	0000	7	77	52	000	0.0				
				0.	00.0	4.	50	15		00				
				2	00	7	20	90						
				8		2	00	00						
				6		0	0.	0.						
							00	00						
							0	0						
				3		1								
				3		7								
				8		7								
				9		2								
	47	-	-	4	4145	2			-	217	2618			
	39	43	39	4	3973	2	34	80	289	387	0050			
	16	57	05	2	3667	8	72	01	801	789	4058			
p	58	31	72	3	0590	9	58	11	607	254	9740			
a	14	83	43	6	0000	3	37	75	381	941	0000			
r	36	55	82	2	0000	9	51	23	565	000	0000			
—	47	58	82	5	0000	7	30	22	000	000	0000			
1	30	81	63	1	0000	0	18	66	000	000	0000			
1	00	30	40	8	0000	7	60	90	000	000	0000			
	0.	00	00	2	0000	6	.0	.0	000	000	0000			
	00	.0	0.	7	000.	6	00	00	000	.00	000.			
	0	00	00	0	000	0			.00	0	000			
			0	0		0			0					
				0.		0.								
				0		0								
				0		0								

	pa r_ 1	pa r_ 2	pa r_ 3	pa r_ 4	par_ 5	pa r_ 6	pa r_ 7	pa r_ 8	par _9	par _10	par_ 11	par_ 12	par_ 13	par_ 14
p a r _ 1 2				0		0								
				4		2								
				8		5								
				4		3								
				5		3								
	67	-	-	6	2358	6	-	-	-	310	6419	7666		
	75	62	55	6	3360	3	59	23	414	784	1762	0747		
	27	29	83	2	0315	8	40	33	310	994	7353	6587		
	30	37	75	3	6880	9	18	23	258	949	6870	0470		
	21	08	67	5	0000	1	41	90	156	244	0000	0000		
	21	75	36	8	0000	3	63	52	862	000	0000	0000		
	77	77	06	1	0000	0	93	70	000	000	0000	0000		
	70	60	25	6	0000	3	77	48	000	000	0000	0000		
	00	60	00	0	0000	9	00	20	000	000	0000	0000		
	0.	00	00	2	0000	8	0.	00	000	000	0000	0000		
	00	.0	0.	3	0000	7	00	.0	000	.00	000.	0000		
	0	00	00	0	.000	0	0	00	.00	0	000	.000		
			0	0		0			0					
				0.		0.								
				0		0								
				0		0								
				0		0								
p a r _ 1 3	36	-	-	2	-	1	32	39	-	169	-	-	1097	
	92	33	30	6	1418	3	50	03	225	373	1186	1695	5185	
	42	94	43	4	1684	8	86	36	793	281	0837	6658	2346	
	48	91	06	0	3894	0	35	83	037	408	8254	1283	0490	
	04	61	58	8	4540	7	17	15	247	957	4170	5200	0000	
	05	11	37	1	0000	9	45	92	410	000	0000	0000	0000	
	42	22	62	5	0000	6	61	00	000	000	0000	0000	0000	
	40	42	18	1	0000	1	.3	.9	000	000	0000	0000	0000	

	pa r_ 1	pa r_ 2	pa r_ 3	pa r_ 4	par_ 5	pa r_ 6	pa r_ 7	pa r_ 8	par _9	par _10	par_ 11	par_ 12	par_ 13	par_ 14
p a r _ 1 4	.0	7.	70	8	0000	8	00	00	000	000	0000	0000	0000	
	00	00	.0	5	0000	8			000	.00	0000	0000	0000	
		0	00	8	0000	9			.00	0	0000	0000	000.	
				6	.000	3			0		.000	.000	000	
				5		4								
				1		5								
				4.		2.								
				0		0								
				0		0								
				0		0								
				1										
				6		8								
				6		7								
				6		2								157
				9	-	9			-		-	-		098
	23	-	-	4	8965	1			142	107	7498	1071	-	096
	34	21	19	7	3791	1	-	-	741	074	1860	9662	5842	643
	27	46	23	0	1520	1	76	78	872	423	2705	3809	0593	715
	76	19	76	8	7500	9	86	91	195	468	7400	2150	7403	000
	01	85	57	9	0000	1	71	44	695	846	0000	0000	2350	000
	49	16	64	3	0000	7	30	49	000	000	0000	0000	0000	000
	57	45	18	8	0000	5	34	10	000	000	0000	0000	0000	000
	90	75	02	8	0000	6	80	26	000	000	0000	0000	0000	000
	.0	7.	10	7	0000	6	.6	.0	000	000	0000	0000	0000	000
	00	00	.0	9	000.	3	45	72	000	.00	0000	0000	0000	000
		0	00	5.	000	8.			.00	0	000.	0000	.000	00.0
				0		9			0		000	.000		00
				0		0								
				0		0								

Correlations of Estimates (Default model)

	par_ 1	par_ 2	par_ 3	par_ 4	par_ 5	par_ 6	par_ 7	par_ 8	par_ 9	par_ 0	par_ 1 1	par_ 1 2	par_ 1 3	par_ 1 4
par_1 0	1.00													
par_2	-	1.00												
par_3	.688	0	1.00											
par_4	.009	.002	0	1.00										
par_5	-	.000	-	.486	0									
par_6	.012	-	-	.030	1.00									
par_7	.000	.002	.135	.007	0	1.00								
par_8	.000	.000	-	-	.007	0	1.00							
par_9	.000	.000	.641	.091	.000	.000	1.00							
par_0	.000	.000	.000	.000	.000	.000	0	1.00						
par_1 1	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.626	0	1.00					
par_1 2	.350	-	-	.000	-	.000	.008	.003	1.00					
par_1 3	.883	.002	.003	.000	.003	.000	.008	.003	0	1.00				
par_1 4	-	.000	.495	-	.037	-	-	-	.001	1.000				
par_1 0	.002	.000	.828	.037	.299	.095	.043	.001	1.000					
par_1 1	.021	-	-	.051	.765	.013	.000	.000	-	.063	1.000			
par_1 2	.004	.233	.051	.765	.013	.000	.000	.005	.063	1.000				
par_1 3	.006	-	-	.014	.805	.003	.000	.000	-	.017	.453	1.000		
par_1 4	.001	.062	.014	.805	.003	.000	.000	.001	.017	.453	1.000			
par_1 0	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1.000			
par_1 1	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1.000			
par_1 2	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1.000			
par_1 3	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1.000			
par_1 4	.004	-	-	.010	-	.003	.000	.000	-	.013	-.117	-.031	.000	1.000
par_1 0	.001	.047	.068	.003	.000	.000	.001	.013	-.117	-.031	.000	1.000		

Critical Ratios for Differences between Parameters (Default model)

	par_ 1	par_ 2	par_ 3	par_ 4	par_ _5	par_ 6	par_ 7	par_ 8	par_ _9	par_ 10	par_ 11	par_ 12	par_ 13	par_ 14
par_ 1	.000													
par_ 2	-	3.88	.000											
par_ 3	8	-	4.86	.959	.000									
par_ 4	4	-	4	-	-	.000								
par_ _5	5.71	.784	8.98	.000										

	par_ 1	par_ 2	par_ 3	par_ 4	par_ _5	par_ 6	par_ 7	par_ 8	par_ _9	par_ 10	par_ 11	par_ 12	par_ 13	par_ 14
	0		4											
par_ 5	4.44 8	4.44 8	4.44 8	4.44 8	.000									
par_ 6	- 5.67 0	- .712	- 6.45 0	.446	4.44 8	.000								
par_ 7	11.4 17	11.4 17	11.4 17	11.4 17	- 4.44 8	11.4 17	.000							
par_ 8	22.5 26	22.5 26	22.5 26	22.5 26	- 4.44 8	22.5 26	22.2 57	.000						
par_ 9	2.22 1	2.22 1	2.22 1	2.22 1	- 4.44 8	2.22 1	- 1.27 6	- 12.6 36	.000					
par_ 10	2.72 2	2.72 2	2.72 2	2.72 2	- 4.44 8	2.72 2	- 10.4 37	- 22.1 73	- 2.04 3	.000				
par_ 11	6.38 8	6.38 8	6.38 8	6.38 8	- 1.93 7	6.38 8	6.38 8	6.38 8	6.38 8	6.38 8	.000			
par_ 12	5.18 1	5.18 1	5.18 1	5.18 1	4.77 7	5.18 1	5.18 1	5.18 1	5.18 1	5.18 1	4.29 8	.000		
par_ 13	5.07 9	5.07 9	5.07 9	5.07 9	- 2.72 8	5.07 9	5.07 9	5.07 9	5.07 9	5.07 9	- 2.60 0	- 4.54 1	.000	
par_ 14	5.13 9	5.13 9	5.13 9	5.13 9	- 4.44 2	5.13 9	5.13 9	5.13 9	5.13 9	5.13 9	- 6.37 3	- 5.17 9	- 5.06 0	.000

Model Fit Summary

CMIN

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	7	5.580	6	.479	.930
Saturated model	11	.000	0		
Independence model	4	8.213	15	.318	.548

RMR, GFI

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	.076	.965	.946	1.220
Saturated model	.000	1.000		
Independence model	.102	1.531	1.343	1.379

Baseline Comparisons

Model	NFI Delta1	RFI rho1	IFI Delta2	TLI rho2	CFI
Default model	.706	.265	.721	1.590	1.735
Saturated model	1.000		1.000		1.000
Independence model	.000	.000	.000	.000	.000

Parsimony-Adjusted Measures

Model	PRATIO	PNFI	PCFI
Default model	.400	.282	.285
Saturated model	.000	.000	.000
Independence model	1.000	.000	.000

NCP

Model	NCP	LO 90	HI 90
Default model	77.580	51.682	110.923
Saturated model	.000	.000	.000
Independence model	269.213	218.155	327.705

FMIN

Model	FMIN	F0	LO 90	HI 90
Default model	.844	.784	.522	1.120
Saturated model	.000	.000	.000	.000
Independence model	2.871	2.719	2.204	3.310

RMSEA

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	.027	.295	.432	.000
Independence model	.042	.383	.470	.000

AIC

Model	AIC	BCC	BIC	CAIC
Default model	113.580	115.862	152.657	167.657
Saturated model	42.000	45.196	96.709	117.709
Independence model	296.213	297.126	311.844	317.844

ECVI

Model	ECVI	LO 90	HI 90	MECVI
Default model	1.147	.886	1.484	1.170
Saturated model	.424	.424	.424	.457
Independence model	2.992	2.476	3.583	3.001

HOELTER

Model	HOELTER	HOELTER
	.05	.01
Default model	15	20
Independence model	9	11

Execution time summary

Minimization: .032

Miscellaneous: .124

Bootstrap: .000

Total: .156

Sumber : Data Diolah dengan menggunakan SPSS.17 dan AMOS.7 - 2014